Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023

Kecamatan Sawahan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian TL
1.	Perencanaan Kinerja		
a.	Agar menuangkan formulasi perhitungan pada IKU dan dipastikan telah selaras antara IKU dengan dokumen perencanaan, evaluasi berkala (pengukuran) dan LKJIP (pelaporan) harus selaras.	Melakukan penyelarasan formulasi perhitungan pada IKU pada dokumen perencanaan, evaluasi berkala (pengukuran) dan LKJIP (pelaporan)	Triwulan I
b.	Memastikan kembali rencana aksi yang dimiliki memuat jadwal pelaksanaan, target, indikator kinerja dari sasaran, program s.d sub kegiatan yang berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) berjalan efektif dan efisien	Melakukan penyelarasan program s.d sub kegiatan pada laporan Rencana Aksi	Awal Tahun
2.	Pengukuran Kinerja		
	Mendorong pelaksanaan rapat monitoring evaluasi kinerja internal secara berkala/tribulan dan Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) paling sedikit memuat	Melakukan rapat evaluasi internal	Per Tribulan
3.	Pelaporan Kinerja		
a.	Memastikan nilai anggaran program yang di catat di Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan Nilai anggaran program yang di catat di LKjIP	Melakukan penyelarasan nilai anggaran program di Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan nilai program di LKJIP	Awal Tahun
b.	Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja termasuk laporan kinerja tribulan dengan mengungkapkan analisis seluruh pencapaian realisasi kinerja yang diperjanjikan dan khususnya dalam memberikan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan juga analisis upaya perbaikan kedepan pada setiap pencapaian kinerja	Melakukan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja	Per Tribulan
c.	Memastikan LKjIP menyajikan formula perhitungan untuk melakukan pengukuran capaian kinerja	Melakukan perbaikan LKJIP dengan menyajikan formula perhitungan untuk melakukan pengukuran capaian kinerja	Awal Tahun
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
a.	Mendorong peningkatan SDM tim penerapan Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah dengan cara mengikuti pelatihan/bimtek tentang SAKIP	Mengikuti BIMTEK tentang SAKIP	Triwulan I
b.	Memastikan rekomendasi/saran atas hasil evaluasi kinerja internal setiap tribulan di tindak lanjuti dengan memberikan Surat Perintah Tugas / nota Dinas untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dapat memberikan dampak yang efektif terhadap capaian kinerja selanjutnya	Menindaklanjuti dengan memberikan Surat Perintah Tugas / nota Dinas dalam setiap kegiatan terhadap capaian kinerja	Setiap Melakukan Kegiatan

Sawahan, 11 Juli 2024

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos

Pembina

19690715 199202 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jl. Sedudo No. 96 Sawahan
email : kec_sawahan@yahoo.co.id
☎ (0358) 322324 Kode Pos 64475

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188 / 60 / K / 411.517 / 2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR KECAMATAN SAWAHAN

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sawahan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17
Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2015, Camat Sawahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan Sawahan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkanKeputusan Camat Sawahan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sawahan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Dipindai dengan CamScanner

Sebagaimana Telah Diubah yang dua kali terakhir Dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerentah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kenerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentangt Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangtunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngtanjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

14. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Tanggal 15 April 2021 nomor : 069.5 / 951 /411.032 / 2021 tentang Permintaan Dokumen SAKIP.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SAWAHAN

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis

KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan Kepada Bupati Nganjuk

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 17 Februari 2021
An. BUPATI NGANJUK
CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

ARDIANSYAH WINARDI, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19830514 200112 1 002

Dipindai dengan CamScanner

La npiran : Keputusan Bupati Nganjuk
No nor : 188/60/K/411.517/2021
Tanggal : 17 Februari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Kecamatan Sawahan
   Tugas : menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Fungsi :
   a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
   b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
   c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
   d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
   e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
   f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan ;
   g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
   h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang ingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ;
   i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ;
   j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Sawahan Kabupaten Nganjuk:

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SAWAHAN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerinta kecamatan	Nilai Sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek: 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitasi	Semua Seksi

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 17 Februari 2021
a.n BUPATI NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

ARDIANSYAH WINARDI, S.STP, M.SI
Penata Tingkat I
NIP. 19830514 200112 1 002

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SAWAHAN
TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN- KINERJA PERANGKAT DAERAH (diisi Kegiatan yang dilaksanakan pd bulan)											
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
							UNSUR																			
							KECAMATAN																			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	V	V	V	V	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	Nilai					2.496.071.550												
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen					1.200.000											
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peragkat Daerah	Dokumen					200.000	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah												
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					200.000	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd												
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					200.000							Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd						
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					200.000	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-Skpd												

Dipindai dengan CamScanner

							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					200.000							Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd					
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunann Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan					200.000	Penyusunan Laporan Lkjip	Penyusunan Laporan Lppd										
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	Dokumen					2.212.569.000													
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					2.211.169.000	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Pegawai	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Pegawai	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Pegawai	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Pegawai	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Pegawai	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Pegawai	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Pegawai	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Pegawai	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Pegawai	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Pegawai	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Pegawai	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Pegawai	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Pegawai
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1.200.000	Penyusunan Laporan Keuangan Calk	Penyusunan Laporan Keuangan Calk											Penyusunan Laporan Keuangan Tw 4
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					200.000	Laporan Bulanan	Laporan Bulanan	Laporan Bulanan Dan Triwulan	Laporan Bulanan	Laporan Bulanan	Laporan Bulanan Dan Triwulan, Semesteran	Laporan Bulanan	Laporan Bulanan	Laporan Bulanan Dan Triwulan	Laporan Bulanan	Laporan Bulanan	Laporan Bulanan Dan Triwulan, Semesteran
							Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Laporan Produktivitas Kinerja Dan Disiplin Pegawai	Laporan					15.596.400													
							Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						9.596.400													
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Orang					6.000.000		Sosualisasi Penyusunan Skp											

Dipindai dengan CamScanner

						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum SKPD	Bulan					68.225.750																
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanter	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					2.500.000	Penyediaan Komponen Listrik Kantor	Penyediaan Komponen Listrik Kantor	Penyediaan Komponen Listrik Kantor	Penyediaan Komponen Listrik Kantor	Penyediaan Komponen Listrik Kantor	Penyediaan Komponen Listrik Kantor	Penyediaan Komponen Listrik Kantor	Penyediaan Komponen Listrik Kantor	Penyediaan Komponen Listrik Kantor	Penyediaan Komponen Listrik Kantor	Penyediaan Komponen Listrik Kantor	Penyediaan Komponen Listrik Kantor	Penyediaan Komponen Listrik Kantor
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					3.370.050	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					45.635.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3.500.000	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan			Penyediaan Bahan Cetakan Dan Penggandaan				Penyediaan Bahan Cetakan Dan Penggandaan							
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					3.000.000	Penyediaan Majalah Dan Koran	Penyediaan Majalah Dan Koran	Penyediaan Majalah Dan Koran	Penyediaan Majalah Dan Koran	Penyediaan Majalah Dan Koran	Penyediaan Majalah Dan Koran	Penyediaan Majalah Dan Koran	Penyediaan Majalah Dan Koran	Penyediaan Majalah Dan Koran	Penyediaan Majalah Dan Koran	Penyediaan Majalah Dan Koran	Penyediaan Majalah Dan Koran
						Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					9.020.000	Penyediaan Perjalanan Dinas Pegawai	Penyediaan Perjalanan Dinas Pegawai	Penyediaan Perjalanan Dinas Pegawai	Penyediaan Perjalanan Dinas Pegawai	Penyediaan Perjalanan Dinas Pegawai	Penyediaan Perjalanan Dinas Pegawai	Penyediaan Perjalanan Dinas Pegawai	Penyediaan Perjalanan Dinas Pegawai	Penyediaan Perjalanan Dinas Pegawai	Penyediaan Perjalanan Dinas Pegawai	Penyediaan Perjalanan Dinas Pegawai	Penyediaan Perjalanan Dinas Pegawai
						Penata Usahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen					1.200.000	Belanja Tenaga Arsip	Belanja Tenaga Arsip	Belanja Tenaga Arsip	Belanja Tenaga Arsip	Belanja Tenaga Arsip	Belanja Tenaga Arsip	Belanja Tenaga Arsip	Belanja Tenaga Arsip	Belanja Tenaga Arsip	Belanja Tenaga Arsip	Belanja Tenaga Arsip	Belanja Tenaga Arsip
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit					26.350.000												
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					9.000.000			Pengadaan Mebel											
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					17.350.000			Pengadaan Tv, Ctv Dan Laptop											
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang SKPD	Bulan					34.200.000												
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan					600.000				Penyediaan Surat Menyurat			Penyediaan Surat Menyurat			Penyediaan Surat Menyurat		

Dipindai dengan CamScanner

							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					33.600.000	Penyediaan Anggaran Listrik, Internet dan Air	Penyediaan Anggaran Listrik, Internet dan Air	Penyediaan Anggaran Listrik, Internet dan Air	Penyediaan Anggaran Listrik, Internet dan Air	Penyediaan Anggaran Listrik, Internet dan Air	Penyediaan Anggaran Listrik, Internet dan Air	Penyediaan Anggaran Listrik, Internet dan Air	Penyediaan Anggaran Listrik, Internet dan Air	Penyediaan Anggaran Listrik, Internet dan Air	Penyediaan Anggaran Listrik, Internet dan Air	Penyediaan Anggaran Listrik, Internet dan Air
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Sawana Dan Prasarana Barang Milik Daerah	Bulan					137.930.400												
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					40.003.200								Pajak Kendaraan Dinas				Pajak Kendaraan Dinas
							Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					3.502.000			Pemeliharaan Mebel								
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					22.650.000			Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin								
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					71.775.200			Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan								
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasrana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	V	V	V	V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan**	%					116.785.000												
							Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Vertikal	Laporan					109.805.000												
							Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan					109.805.000			Forum Kecamatan Sehat	Safari Ramadhan, Sosialisasi Pbb	Rapan Intensifikasi Pemasukan Pbb	Rapat Evaluasi Pemasukan Pbb	Pembinaan Fkub	Pembinaan Uks	Rapat Evaluasi Pemasukan Pbb	Rapat Evaluasi Pemasukan Pbb			

Dipindai dengan CamScanner

							Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Terkait Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	Kegiatan					5.000.000																	
							Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen					5.000.000									Rapat Koordijnasi Pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum				
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Warga Yang mendapat Pelayanan	Kegiatan					1.930.000															
							Pelaksana Urusan pemerintahan yang Terkait Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	Laporan					965.000							Sosialisasi Ikd						
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan					965.000								Koordinasi Pelimpahan Kewenangan					
3			V	V	V	V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan**	Kegiatan					51.670.000																
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Kegiatan					51.670.000															
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga					35.000.000		Musrenbang Dan Forum Opd Kecamatan			Pembinaan Bumdes			Pembinaan Umkm			Rakor Stunting	

Dipindai dengan CamScanner

							Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen					16.670.000	Pleno Rutin Pkk	Pleno Rutin Pkk, Penyuluhan Perkoperasian (Kopwan)		Pleno Rutin Pkk	Pleno Rutin Pkk, Peningkatan Keimanan	Pleno Rutin Pkk	Pleno Rutin Pkk	Pleno Rutin Pkk, Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Pleno Rutin Pkk	Pleno Rutin Pkk	Pleno Rutin Pkk, Penyuluhan Ptp Dan Pengolahan Hasil	Pleno Rutin Pkk
4			V	V	V	V	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeriintahan di Tingkat Kecamatan**	%					21.000.000															
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Dan TNI	laporan					21.000.000														
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan					21.000.000	Sinergitas Dengan POLRI Dan TNI Dan Instansi Vertikal			Sinergitas Dengan POLRI Dan TNI Dan Instansi Vertikal			Sinergitas Dengan POLRI Dan TNI Dan Instansi Vertikal			Sinergitas Dengan POLRI Dan TNI Dan Instansi Vertikal		
5			V	V	V	V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persebtase Warga/Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	%					30.070.000															
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Warga/Lembaga Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Lembaga/ Organisasi Masyarakt					30.070.000														

Dipindai dengan CamScanner

							Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang					30.070.000				HUT Nganjuk				Kegiatan Pembinaan Kelembagaan, Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Resepsi Kenegaraan, Kegiatan HUT RI, Paskibra				
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	V	V	V	V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kegiatan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemeriatah Desa**	**%**					**59.567.500**											
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Desa/kelurahan**					**59.567.500**											
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen					32.567.500	Rakor Kades, Rakor Sekdes	Rakor Kades, Rakor Sekdes	Fasilitasi Administrasi Tata - Pemerintahan Desa, Rakor Kasi/Kaur	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas BPD, Rakor Kades, Rakor Sekdes	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa, Rakor Kades, Rakor Sekdes	Fasilitasi Administrasi Tata - Pemerintahan Desa, Rakor Kamituwo, Rakor Kades, Rakor Sekdes	Rakor Kasi/Kaur, Rakor Kades, Rakor Sekdes	Rakor Kades, Rakor Sekdes	Fasilitasi APBdes P.APBdes, Fasilitasi pelaksanaan tugas BPD, Rakor Kades, Rakor Sekdes	Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa, Rakor Kades, Rakor Sekdes	Rakor Kamituwo, Rakor Kades, Rakor Sekdes	Fasilitasi APBdes P.APBdes, Rakor Kades, Rakor Sekdes
							Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumem					12.000.000		Pembinaan keamanan dan ketertiban							Pembinaan keamanan dan ketertiban		

Dipindai dengan CamScanner

						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen					15.000.000									Fasilitasi Perencanaan Desa		Rapat Fasilitasi Epdesksel	Rapat Sistem Informasi - Desa/Profil Desa

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

CAMAT SAWAHAN

SUMARNO,S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19690807 199003 1 010

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN LAPORAN
HASIL EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIBULAN
(I,II,III,IV)



KECAMATAN
SAWAHAN TAHUN 2023

Dipindai dengan

LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN SAWAHAN TAHUN 2023

A.PENGANTAR

Tim Penerapan Sintem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Sawahan Tahun 2023 telah melaksanakan evaluasi internal terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Sawahan.

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Kecamatan Sawahan saat ini meliputi 6 program 12 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan, yaitu

I.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA

Kegiatan:

1.Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulanan / tribulan / semesteran SKPD

3.Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pengadaan pakaian Batik

4.Adminstrasi Umum Perangkat daerah
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- penyediaan peralatan rumah tangga
- penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraaan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penata usahaan Arsip dinamis pada SKPD

5.Pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan mebel
- Pengadaan peralatan dan mesin lainya

6.Penyediaaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

7.Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- Penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaaan mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II..PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Keglatan :

1.Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi/sinergi perencanaaan dan pelaksanaan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait

2.Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum

- Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahlan kepada camat

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Keglatan :

1, Koordinasi kegitan pemberdayaan desa

- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pcmbangunan di dcsa
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

IV.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Keglatan :

1.Koorrfinasi upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum

- Sinergitas dengan POLRI,TNI dan Instansi vertikan di wilayah Kecamatan

V.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Keglatan :

1.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI

V.PROGRAM PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Keglatan :

1.Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
- Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan petertiban umum
- Fasilitasi penyusunan perencaaan pembangunan partisipatif

B. HASIL EVALUASI

a. CAMAT

a. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas,
c. Persentase Tingkat Kehadiran ASN di lingkup Kecamatan
d. Jumlah perencanaan dan laporan kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas
e. Tingkat kelancaran administrasi administrasi perkantoran .

b. SEKRETARIS KECAMATAN

a. Presentase tingkat kehadiran ASN lingkup Kecamatan

b. Jumlah perencanaan dan laporan kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas
c. Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
d. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasi pelaksanaan kegiatan
e. Pengelolaan urusan keuangan
f. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan
g. Pelaksanaaan urusan rumah tangga

c KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Pengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan .

d. KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait ;
b. Melaksanakan peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan ;
e. Melaksanakan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. Melaksanaan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atai instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan;
i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan ;
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

e. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan

b. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;

c. Melaksanakan penongkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

d. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;

e. Melaksanakan pemberdayaaan masyarakat di kelurahan;

f. Melaksanakan evaluasi kelurahan

f. KASI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhinneka Tunffal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

b. Melaksanakan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan

c. Melaksanakan hannonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

d. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara RI;

e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan(bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional ;

f. Melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

g. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional ;

h. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan pertundang-undangan;

i. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;

j. Melaksanakan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

g. KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asetdesa;

d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang• undangan;

e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
h. Melaksanakan pemberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian peranqkat desa ;
i. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan
j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
k. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. Melaksanakan fasilitasi penataan , pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa ;
m. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan ;

C.KENDALA

Beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikutb :

1. Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat serta ketertiban dan keamanan , hal ini dikarenakan kurangnya pejabat struktural (kekosongan 5 jabatan struktural)
2. Kurang optimalnya penerapan/implentasi tata kelola pemerintahan desa.
3. Keterlambatan desa dalam menyusun APBDes, LKPJ, LPPD, IPPD serta SPJ ADD/DD.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan.

D. REKOMENDASI

1. Meningkatkan efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat serta ketertiban dan keamanan disamping itu juga mengusulkan jabatan kosong segera diisi kepada pejabat yang berwenang.
2. Melakukan fasilitasi , pembinaan, bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa dalam implentasi tata kelola pemerintahan.
3. Meningkatkan koordmasi dan fasilitasi dalam penyusunan APBDes, LKPJ, LPPD, IPPD serta SPJ ADD/DD.
4. Mengoptimal penggunaan sarana dan prasarana.

Dipindai dengan

E. KESIMPULAN :

Mengacu pada hal-hal tersebut di atas di Kecamatan Sawahan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan sesuai dengan perjanjian kinerja yang dibuat oleh Camat sampai dengan tingkat Stat perlu ditingkatkan koordinasi baik vertikal maupun horizontal untuk meningkatkan kelancaran tugas OPD Kecamatan Sawahan.

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

SUKIRNO,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690807 199003 1 010

Dipindai dengan

FOTO KEGIATAN RAPAT EVALUASI INTERNAL
KECAMATAN SAWAHAN
TAHUN 2023





TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI INTERNAL S/D TRIBULAN I TA.2023
OPD KECAMATAN SAWAHAN

NO	KENDALA	REKOMENDASI ATAS HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	Belum tercapainya target kegiatan	Percepatan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan berfokus pada pencapaian	Segera melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan pada Tribulan I Tahun 2024
2	Nilai SAKIP meningkat dari tahun sebelumnya	Meningkatkan Nilai SAKIP	Mempersiapkan dokumen-dokumen terkait SAKIP
3	Ada Program yang realisasinya masih 0 %	Untuk segera melaksanakan kegiatan agar realisasi sesuai dengan target	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi sesuai RAK dalam DPA

Sawahan, 31 Maret 2023
CAMAT SAWAHAN

SUKIRNO,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19690807 199003 1 010

LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN KEGIATAN
KECAMATAN SAWAHAN TAHUN 2023

A.PENGANTAR

Tim Penerapan Sintem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Sawahan Tahun 2023 telah melaksanakan evaluasi internal terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Sawahan.

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Kecamatan Sawahan saat ini meliputi 6 program 12 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan, yaitu

I.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA

Kegiatan :

1.Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.Administrasi Keuangan Perangkat daerah

- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulanan / tribulan / semesteran SKPD

3.Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pengadaan pakaian Batik

4.Adminstrasi Umum Perangkat daerah

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- penyediaan peralatan rumah tangga
- penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraaan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penata usahaan Arsip dinamis pada SKPD

5.Pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan mebel
- Pengadaan peralatan dan mesin lainya

6.Penyediaaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

7.Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

- Penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaaan mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II..PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Keglatan :

1.Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi/sinergi perencanaaan dan pelaksanaan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait

2.Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum

- Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahlan kepada camat

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Keglatan :

1, Koordinasi kegitan pemberdayaan desa

- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pcmbangunan di dcsa
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

IV.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Keglatan :

1.Koorrfinasi upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum

- Sinergitas dengan POLRI,TNI dan Instansi vertikan di wilayah Kecamatan

V.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Keglatan :

1.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI

V.PROGRAM PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Keglatan :

1.Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
- Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan petertiban umum

- Fasilitasi penyusunan perencaaan pembangunan partisipatif

B. HASIL EVALUASI

a. CAMAT

a. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas,
c. Persentase Tingkat Kehadiran ASN di lingkup Kecamatan
d. Jumlah perencanaan dan laporan kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas
e. Tingkat kelancaran administrasi administrasi perkantoran .

b. SEKRETARIS KECAMATAN

a. Presentase tingkat kehadiran ASN lingkup Kecamatan
b. Jumlah perencanaan dan laporan kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas
c. Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
d. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasi pelaksanaan kegiatan
e. Pengelolaan urusan keuangan
f. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan
g. Pelaksanaaan urusan rumah tangga

c KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Pengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan .

d. KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait ;
b. Melaksanakan peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan ;
e. Melaksanakan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

f. Melaksanaan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atai instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;

g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan;

i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan ;

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

e. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan ;

b. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;

c. Melaksanakan penongkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

d. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;

e. Melaksanakan pemberdayaaan masyarakat di kelurahan;

f. Melaksanakan evaluasi kelurahan

f. KASI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhinneka Tunffal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

b. Melaksanakan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan

c. Melaksanakan hannonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

d. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara RI;

e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan(bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional ;

f. Melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

g. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional ;

h. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

i. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;

j. Melaksanakan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

g. KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asetdesa;

d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang• undangan;

e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

f. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;

h. Melaksanakan pemberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian peranqkat desa ;

i. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan

j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan

k. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

l. Melaksanakan fasilitasi penataan , pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa ;

m. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

n. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan ;

C.KENDALA

Beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas dan koordinasi dengan lintas sektor di Kecamatan sawahan sehingga kegiatan penyelenggaraan di Kecamatan, pemberdayaan masyarakat serta ketertiban dan keamanan berjalan dengan baik
2. Melakukan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis kepada pemerintah Desa dalam Implementasi tata kelola pemerintahan
3. PPTK agar penyerapan dipacu dan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan di DPA
4. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana.

D. REKOMENDASI

1. Meningkatnya efektifitas dan koordinasi dengan lintas sektor di Kecamatan sawahan sehingga kegiatan penyelenggaraan di Kecamatan, pemberdayaan masyarakat serta ketertiban dan keamanan berjalan dengan baik.
2. Melakukan fasilitasi , pembinaan, bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa dalam implentasi tata kelola pemerintahan.
3. PPTK Agar penyerapan anggaran dipacu dan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan di DPA
4. Mengoptimal penggunaan sarana dan prasarana.

E. KESIMPULAN :

Mengacu pada hal-hal tersebut di atas di Kecamatan Sawahan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan sesuai dengan perjanjian kinerja yang dibuat oleh Camat sampai dengan tingkat Stat perlu ditingkatkan koordinasi baik vertikal maupun horizontal untuk meningkatkan kelancaran tugas OPD Kecamatan Sawahan.

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19690715 199202 1 002

Dipindai dengan

FOTO KEGIATAN RAPAT EVALUASI INTERNAL
KECAMATAN SAWAHAN
TAHUN 2023



Dipindai dengan

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI INTERNAL S/D TRIBULAN III
TA.2023
OPD KECAMATAN SAWAHAN

NO	KENDALA	REKOMENDASI ATAS HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	Penyerapan anggaran untuk TW III belum optimal dan tidak sesuai target	Agar PPTK segera mengoptimalkan penyerapan anggran	Kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan untuk segera dilakukan kegiatan sesuai dengan RAK di DPA
2	Masih adanya program kegiatan yang belum sesuai dengan target	Untuk segera melaksanakan kegiatan agar realisasi sesuai dengan target	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi sesuai RAK dalam DPA

Sawahan, 29 September 2023
CAMAT SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19690715 199202 1 002

LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN SAWAHAN TAHUN 2023

A.PENGANTAR

Tim Penerapan Sintem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Sawahan Tahun 2023 telah melaksanakan evaluasi internal terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Sawahan.

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Kecamatan Sawahan saat ini meliputi 6 program 12 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan, yaitu

I.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA

Kegiatan :

1.Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.Administrasi Keuangan Perangkat daerah

- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulanan / tribulan / semesteran SKPD

3.Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pengadaan pakaian Batik

4.Adminstrasi Umum Perangkat daerah

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- penyediaan peralatan rumah tangga
- penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraaan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penata usahaan Arsip dinamis pada SKPD

5.Pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan mebel
- Pengadaan peralatan dan mesin lainya

6.Penyediaaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

7.Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

- Penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaaan mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II..PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Keglatan :

1.Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi/sinergi perencanaaan dan pelaksanaan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait

2.Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum

- Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahlan kepada camat

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Keglatan :

1, Koordinasi kegitan pemberdayaan desa

- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pcmbangunan di dcsa
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

IV.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Keglatan :

1.Koorrfinasi upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum

- Sinergitas dengan POLRI,TNI dan Instansi vertikan di wilayah Kecamatan

V.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Keglatan :

1.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI

V.PROGRAM PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Keglatan :

1.Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
- Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan petertiban umum

- Fasilitasi penyusunan perencaaan pembangunan partisipatif

B. HASIL EVALUASI

a. CAMAT

a. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas,
c. Persentase Tingkat Kehadiran ASN di lingkup Kecamatan
d. Jumlah perencanaan dan laporan kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas
e. Tingkat kelancaran administrasi administrasi perkantoran .

b. SEKRETARIS KECAMATAN

a. Presentase tingkat kehadiran ASN lingkup Kecamatan
b. Jumlah perencanaan dan laporan kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas
c. Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
d. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasi pelaksanaan kegiatan
e. Pengelolaan urusan keuangan
f. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan
g. Pelaksanaaan urusan rumah tangga

c KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Pengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan .

d. KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait ;
b. Melaksanakan peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan ;
e. Melaksanakan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

f. Melaksanaan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atai instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;

g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan;

i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan ;

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

e. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan ;

b. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;

c. Melaksanakan penongkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

d. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;

e. Melaksanakan pemberdayaaan masyarakat di kelurahan;

f. Melaksanakan evaluasi kelurahan

f. KASI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhinneka Tunffal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

b. Melaksanakan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan

c. Melaksanakan hannonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

d. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara RI;

e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan(bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional ;

f. Melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

g. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional ;

h. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

i. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;

j. Melaksanakan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

g. KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asetdesa;

d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang• undangan;

e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

f. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;

h. Melaksanakan pemberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian peranqkat desa ;

i. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan

j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan

k. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

l. Melaksanakan fasilitasi penataan , pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa ;

m. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

n. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan ;

C.KENDALA

Beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya program kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan rencana aksi di RAK sesuai dengan anggaran di DPA
2. Masih adanya desa yang belum melaporkan kegiatan sesuai dengan monitoring dan evaluasi di desa

Dipindai dengan

D. REKOMENDASI

1. Agar melaksanakan Kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan rencana aksi di RAK sesuai dengan anggaran di DPA
2. Agar desa membuat laporan sesuai hasil Monev di desa dan melaporkan ke Kecamatan

E. KESIMPULAN :

Mengacu pada hal-hal tersebut di atas di Kecamatan Sawahan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan sesuai dengan perjanjian kinerja yang dibuat oleh Camat sampai dengan tingkat Stat perlu ditingkatkan koordinasi baik vertikal maupun horizontal untuk meningkatkan kelancaran tugas OPD Kecamatan Sawahan.

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19690715 199202 1 002

Dipindai dengan

FOTO KEGIATAN RAPAT EVALUASI INTERNAL
KECAMATAN SAWAHAN
TAHUN 2023



Dipindai dengan

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI INTERNAL S/D TRIBULAN IV
TA.2023
OPD KECAMATAN SAWAHAN

NO	KENDALA	REKOMENDASI ATAS HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	Masih adanya program kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan rencana aksi di RAK sesuai dengan anggran di DPA	Agar melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakn secara maksimal sesuai dengan rencana aksi di RAK sesuai dengan anggaran di DPA	Kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan untuk segera dilakukan kegiatan sesuai dengan RAK di DPA
2	Masih adanya desa yang belum melaporkan kegiatan sesuai dengan monitoring dan evaluasi di dea	Agar desa membuat laporan sesuai hasil monev di desa dan melaporkan ke Kecamatan	Agar desa membuat laporan sesuai hasil monev di desa dan melaporkan ke Kecamatan

Sawahan, 30 Desember 2023
CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19690715 199202 1 002

LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN KEGIATAN
KECAMATAN SAWAHAN TAHUN 2023

A.PENGANTAR

Tim Penerapan Sintem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Sawahan Tahun 2023 telah melaksanakan evaluasi internal terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Sawahan.

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Kecamatan Sawahan saat ini meliputi 6 program 12 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan, yaitu

I.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA

Kegiatan:

1.Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.Administrasi Keuangan Perangkat daerah

- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulanan / tribulan / semesteran SKPD

3.Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pengadaan pakaian Batik

4.Adminstrasi Umum Perangkat daerah

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- penyediaan peralatan rumah tangga
- penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraaan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penata usahaan Arsip dinamis pada SKPD

5.Pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan mebel
- Pengadaan peralatan dan mesin lainya

6.Penyediaaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

7.Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

- Penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaaan mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II..PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Keglatan :

1.Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi/sinergi perencanaaan dan pelaksanaan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait

2.Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum

- Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahlan kepada camat

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Keglatan :

1, Koordinasi kegitan pemberdayaan desa

- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pcmbangunan di dcsa
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

IV.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Keglatan :

1.Koorrfinasi upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum

- Sinergitas dengan POLRI,TNI dan Instansi vertikan di wilayah Kecamatan

V.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Keglatan :

1.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI

V.PROGRAM PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Keglatan :

1.Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
- Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan petertiban umum

- Fasilitasi penyusunan perencaaan pembangunan partisipatif

B. HASIL EVALUASI

a. CAMAT

a. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas,
c. Persentase Tingkat Kehadiran ASN di lingkup Kecamatan
d. Jumlah perencanaan dan laporan kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas
e. Tingkat kelancaran administrasi administrasi perkantoran .

b. SEKRETARIS KECAMATAN

a. Presentase tingkat kehadiran ASN lingkup Kecamatan
b. Jumlah perencanaan dan laporan kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas
c. Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
d. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasi pelaksanaan kegiatan
e. Pengelolaan urusan keuangan
f. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan
g. Pelaksanaaan urusan rumah tangga

c KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Pengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan .

d. KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait ;
b. Melaksanakan peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan ;
e. Melaksanakan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

f. Melaksanaan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atai instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;

g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan;

i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan ;

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

e. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan ;

b. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;

c. Melaksanakan penongkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

d. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;

e. Melaksanakan pemberdayaaan masyarakat di kelurahan;

f. Melaksanakan evaluasi kelurahan

f. KASI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhinneka Tunffal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

b. Melaksanakan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan

c. Melaksanakan hannonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

d. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara RI;

e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan(bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional ;

f. Melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

g. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional ;

h. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

i. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;

j. Melaksanakan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

g. KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asetdesa;

d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang• undangan;

e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

f. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;

h. Melaksanakan pemberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian peranqkat desa ;

i. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan

j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan

k. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

l. Melaksanakan fasilitasi penataan , pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa ;

m. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

n. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan ;

C.KENDALA

Beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat serta ketertiban dan keamanan disamping itu juga mengusulkan jabatan kosong segera diisi kepada pejabat yang berwenang
2. Melakukan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis kepada pemerintah Desa dalam Implementasi tata kelola pemerintahan
3. PPTK agar penyerapan dipacu dan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan di DPA
4. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana.

D. REKOMENDASI

1. Meningkatkan efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat serta ketertiban dan keamanan disamping itu juga mengusulkan jabatan kosong segera diisi kepada pejabat yang berwenang.
2. Melakukan fasilitasi , pembinaan, bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa dalam implentasi tata kelola pemerintahan.
3. PPTK Agar penyerapan anggaran dipacu dan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan di DPA
4. Mengoptimal penggunaan sarana dan prasarana.

E. KESIMPULAN :

Mengacu pada hal-hal tersebut di atas di Kecamatan Sawahan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan sesuai dengan perjanjian kinerja yang dibuat oleh Camat sampai dengan tingkat Stat perlu ditingkatkan koordinasi baik vertikal maupun horizontal untuk meningkatkan kelancaran tugas OPD Kecamatan Sawahan.

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19690715 199202 1 002

Dipindai dengan

FOTO KEGIATAN RAPAT EVALUASI INTERNAL
KECAMATAN SAWAHAN
TAHUN 2023



Dipindai dengan

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI INTERNAL S/D TRIBULAN II TA.2023
OPD KECAMATAN SAWAHAN

NO	KENDALA	REKOMENDASI ATAS HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	Belum tercapainya target kegiatan	Belum terpenuhinya target kegiatan di rencana aksi TW II	Segera dilaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana aksi sesuai DPA
2	PPTK agar melaksanakan kegiatan sesuai DPA	Agar terpenuhinya sesuai dengan rencana aksi DPA	Sesuai dengan target penyerapan anggaran di DPA
3	Masih adanya program kegiatan yang belum sesuai dengan target	Untuk segera melaksanakan kegiatan agar realisasi sesuai dengan target	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi sesuai RAK dalam DPA

Sawahan, 30 Juni 2023
CAMAT SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19690715 199202 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

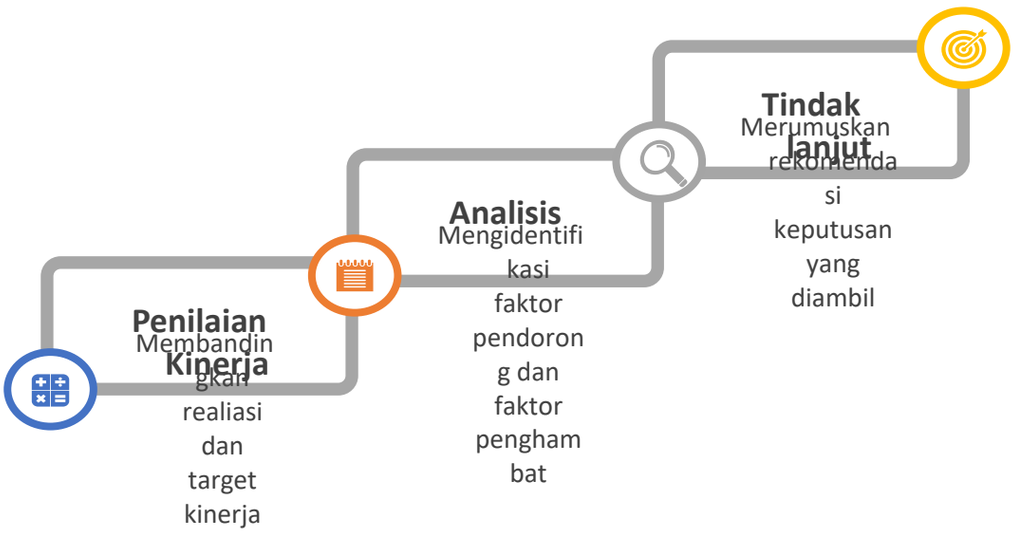
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sampai triwulan IV melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

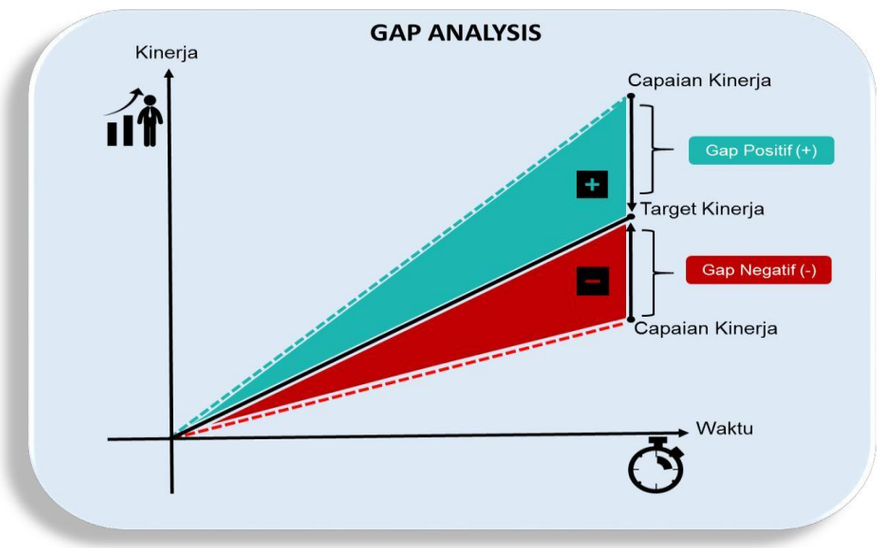
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.

2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

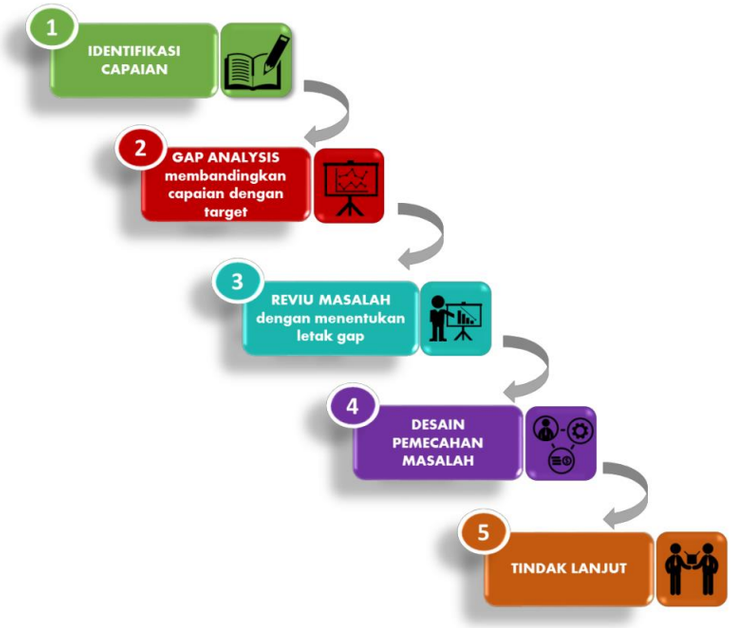
Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif

5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	91,58	106,4%
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	95,75%	95,75%
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**89,96**	**91,58**	**101,8%**
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kinerja SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
3	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peragkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunann Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	100%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Produktivitas Kinerja Dan Disiplin Pegawai	1 Laporan	1 Laporan	100%
14	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	22 Paket	100%
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	100%
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%
18	Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100%
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
22	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
23	Penata Usahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	6 Unit	6 Unit	100%
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100%

27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	100%
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Sawana Dan Prasarana Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	100%
32	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	100%
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	100%
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100%
35	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan**	**100%**	**83%**	**83%**
36	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Vertikal	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
37	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan	100%
38	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinsi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Terkait Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
39	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Warga Yang mendapat Pelayanan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100%
42	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	0 Laporan	0%
43	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan**	**15 Kegiatan**	**15 Kegiatan**	**100%**
44	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100%
45	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga	8 Lembaga	100%
46	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
47	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**100%**
48	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Dan TNI	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
49	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	3 Laporan	3 Laporan	100%

	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
50	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persebtase Warga/Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**4 Kegiatan**	**4 kegiatan**	**100%**
51	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Warga/Lembaga Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsan	440 Orang	440 Orang	100%
52	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	440 Orang	440 Orang	100%
53	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kegiatan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**15 Kegiatan**	**15 Kegiatan**	**100%**
54	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100%
55	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
56	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
57	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

1. Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2023

Untuk capaian kinerja Program Kecamatan Sawahan tahun 2023 triwulan III ada Program yang belum tercapai seperti PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK dengan capaian 60%, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN dengan capaian 53%, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM dengan capaian 0%, PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM dengan capaian 75%, dan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA dengan capaian 46,6%, karena ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK dan Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III

Dan ada pula yang melebihi capaian pada target yang ditentukan, dikarenakan kurang tepatnya dalam penentuan target pada kegiatan dan sub kegiatan seperti PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan capaian 102%.

2. Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Untuk realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kecamatan Sawahan tahun 2023 triwulan III ada yang belum tercapai seperti Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Mebel, Koordinasi pemeliharan Prasarana dan saranan Pelayanan Umum, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban dikarenakan adanya keterbatasan staf dan Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III sehingga pada kegiatan dan sub kegiatan belum terlaksana.

Dan banyak pula pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi capaian pada target yang ditentukan, dikarenakan kurang tepatnya dalam penentuan target pada Kegiatan dan Sub Kegiatan.

3. Analisis realisasi keuangan Perangkat Daerah Tahun 2023

Untuk realisasi keuangan Kecamatan Sawahan pada tahun 2023 triwulan III yaitu sebesar 1.395.751.734 dengan anggaran 2.865.111.850 sehingga realisasi yang telah tercapai yaitu 48,71%

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat secara optimal	1. Keterbatasan staf yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban	1. Pola kerja yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif 2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan dengan Intansi Vertikal Terkait sehingga tercipta suasana kerja yang	1. Belum optimalnya partisipasi dari masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III

		kondusif dan nyaman	
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	1. Meningkatnya tertib administrasi desa dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 2. Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang siap dan mampu menduduki jabatan melalui seleksi pengisian lowongan secara terbuka dan akuntabel.	1. Belum maksimalnya perangkat desa yang memadai dalam pengelolaan Tata Pemerintahan Desa. 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-

5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	Kegiatan belum terlaksana
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	Kegiatan belum terlaksana
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	Adanya mutasi dan ASN yang pensiun
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	Kegiatan belum terlaksana
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	Kegiatan belum terlaksana
14	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	Kegiatan belum terlaksana
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	Kegiatan belum terlaksana
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
18	Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-

22	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
23	Penata Usahaan Arsip dinamis pada SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	Kegiatan belum terlaksana
25	Pengadaan Mebel	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	Kegiatan belum terlaksana
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	Kegiatan belum terlaksana
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
32	Pemeliharaan Mebel	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	Kegiatan belum terlaksana
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
35	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
36	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK

37	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
38	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
39	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
42	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
43	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para perangkat desa dan masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
44	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para perangkat desa dan masyarakat sehingga tercipta suasana	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
45	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para perangkat desa dan masyarakat sehingga tercipta suasana	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada

			2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
46	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para perangkat desa dan masyarakat sehingga tercipta suasana	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
47	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Hubungan yang baik dan harmonis dengan FORPINCAM, perangkat desa, lembaga, dan masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman.	1. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 2. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang
48	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Hubungan yang baik dan harmonis dengan FORPINCAM, perangkat desa, lembaga, dan masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman.	1. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 2. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang
49	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Hubungan yang baik dan harmonis dengan FORPINCAM, perangkat desa, lembaga, dan masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman.	1. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 2. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang
50	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Hubungan yang baik dan harmonis dengan FORPINCAM, perangkat desa, lembaga, dan masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman.	1. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 2. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang
51	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hubungan yang baik dan harmonis dengan FORPINCAM, perangkat desa, lembaga, dan masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman.	1. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 2. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang
52	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Hubungan yang baik dan harmonis dengan FORPINCAM, perangkat desa, lembaga, dan masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman.	1. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 2. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang
53	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Dan Pengawasan pada Pemerintahan Desa, agar desa dapat berkembang dengan baik	1. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 2. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang
54	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Dan Pengawasan pada Pemerintahan Desa, agar desa dapat berkembang dengan baik	1. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 2. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang
55	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Dan Pengawasan pada Pemerintahan Desa, agar desa dapat berkembang dengan baik	1. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 2. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang
56	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Dan Pengawasan pada Pemerintahan Desa, agar desa dapat berkembang dengan baik	1. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 2. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang
57	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Dan Pengawasan pada Pemerintahan Desa, agar desa dapat berkembang dengan baik	1. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 2. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

IV.2. Tindak Lanjut

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Kecamatan Sawahan Kabupaten/Kota Nganjuk
Periode Pelaksanaan: Tribulan III Tahun Anggaran 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 86
2. Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang : 100%
3. Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan y : 100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi(2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggunjawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**89,69**	2.495.411.550	**76,6**	**2.088.515.933**	**89,96**	**2.496.071.550**	**82,98**	**246.674.413**	**91,58**	**638.648.011**	91,92	**394.642.710**			91,92	1.279.965.134	91,92	3.368.481.067	102%	135%	KECAMATAN SAWAHAN
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kinerja SKPD**	7 Dokumen	1.200.000	**8 Dokumen**	**820.900**	**8 Dokumen**	**1.200.000**	**6 Dokumen**	**800.000**	**0 Dokumen**	**0**	**0 Dokumen**	**0**			6 Dokumen	800.000	14 Dokumen	1.620.900	200%	135%	KECAMATAN SAWAHAN
		Penyusunana dokumen perencanan perangkat daerah (Kec. sawahan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Peragkat Daerah	2 Dokumen	200.000	2 Dokumen	171.150	2 Dokumen	200.000	2 Dokumen	200.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			2 Dokumen	200.000	4 Dokumen	371.150	200%	186%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	149.950	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			1 Dokumen	200.000	2 Dokumen	349.950	200%	175%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	149.950	1 Dokumen	200.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	1 Dokumen	149.950	100%	75%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	199.900	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			1 Dokumen	200.000	2 Dokumen	399.900	200%	200%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi dan penyusunan dokumen Peerubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	149.950	1 Dokumen	200.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	1 Dokumen	149.950	100%	75%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunann Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Dokumen	200.000	1 Laporan	0	2 Laporan	200.000	2 Laporan	200.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0			2 Laporan	200.000	3 Laporan	200.000	150%	100%	KECAMATAN SAWAHAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Keuangan SKPD**	**12 bulan**	2.212.569.000	**12 Bulan**	**1.823.670.841**	**12 Bulan**	**2.212.569.000**	**3 Bulan**	**216.084.826**	**3 Bulan**	**590.297.078**	**3 Bulan**	**335.915.170**			9 Bulan	1.142.297.074	21 Bulan	2.965.967.915	175%	134%	KECAMATAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.211.169.000	17 Orang/Bul	1.822.730.841	22 Orang/B	2.211.169.000	13 Orang/Bul	216.084.826	12 Orang/Bul	590.297.078	12 Orang/Bul	335.915.170			12 Orang/Bul	1.142.297.074	21 Orang/Bulan	2.965.027.915	175%	134%	KECAMATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.200.000	1 Laporan	840.000	1 Laporan	1.200.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0			0 Laporan	0	1 Laporan	840.000	100%	70%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	200.000	12 Laporan	100.000	12 Laporan	200.000	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0			9 Laporan	0	21 Laporan	100.000	175%	50%	KECAMATAN SAWAHAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Produktivitas Kinerja Dan Disiplin Pegawai**	**1 Laporan**	15.596.400	**1 Laporan**	**9.939.200**	**1 Laporan**	**15.596.400**	**0 Laporan**	**0**	**0 Laporan**	**0**	**0 Laporan**	**0**			0 Laporan	0	1 Laporan	9.939.200	100%	64%	KECAMATAN SAWAHAN
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	9.596.400	22 Paket	9.939.200	22 Paket	9.596.400	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0			0 Paket	0	22 Paket	9.939.200	100%	104%	KECAMATAN
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	6 Orang	6.000.000	-	0	6 Orang	6.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0 Orang	0	0%	0%	KECAMATAN SAWAHAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum SKPD**	**12 bulan**	73.330.050	**12 Bulan**	**43.438.350**	**12 Bulan**	**68.225.750**	**3 Bulan**	**10.460.350**	**3 Bulan**	**15.444.800**	**3 Bulan**	**19.081.150**			9 Bulan	44.986.300	21 Bulan	88.424.650	175%	121%	KECAMATAN

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.500.000	5 Paket	2.500.000	5 Paket	2.500.000	1 Paket	785.400	1 Paket	729.800	1 Paket	984.800			3 Paket	2.500.000	8 Paket	5.000.000	160%	200%	KECAMATAN SAWAHAN
		Penyediaaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	3.370.050	8 Paket	2.698.650	8 Paket	3.370.050	2 Paket	923.300	2 Paket	682.450	2 Paket	975.350			6 Paket	2.581.100	14 Paket	5.279.750	175%	157%	KECAMATAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**3 Paket**	45.000.000	3 Paket	31.684.200	3 Paket	45.635.700	1 Paket	7.853.400	1 Paket	11.801.550	1 Paket	10.642.750			3 Paket	30.297.700	6 Paket	61.981.900	200%	138%	KECAMATAN
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.500.000	2 Paket	2.325.500	2 Paket	3.500.000	0 Paket	78.250	1 Paket	361.000	1 Paket	878.250			2 Paket	1.317.500	4 Paket	3.643.000	200%	104%	KECAMATAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	750.000	6 Dokumen	1.500.000			9 Dokumen	2.250.000	10 Dokumen	5.250.000	1000%	175%	KECAMATAN SAWAHAN
		Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9.000.000	12 Laporan	1.230.000	12 Laporan	9.020.000	3 Laporan	820.000	3 Laporan	820.000	3 Laporan	4.100.000			9 Laporan	5.740.000	21 Laporan	6.970.000	175%	77%	KECAMATAN
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6 Dokumen	1.200.000	-	0	6 Dokumen	1.200.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	300.000	0 Dokumen	0			4 Dokumen	300.000	4 Dokumen	300.000	66%	25%	KECAMATAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**6 Jenis**	25.000.000	**6 Unit**	**49.450.000**	**6 Unit**	**26.350.000**	**0 Unit**	**0**	**0 Unit**	**0**	**0 Unit**	**0**			**0 Unit**	0	6 Unit	49.450.000	100%	198%	KECAMATAN SAWAHAN
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**2 Unit**	9.000.000	2 Unit	49.450.000	2 Unit	9.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	2 Unit	49.450.000	100%	549%	KECAMATAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**4 Unit**	16.000.000	-	0	4 Unit	17.350.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0 Unit	0	0%	0%	KECAMATAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang SKPD**	**12 Bulan**	34.200.000	**12 Bulan**	**17.998.692**	**12 Bulan**	**34.200.000**	**3 Bulan**	**4.834.237**	**3 Bulan**	**3.079.633**	**3 Bulan**	**4.506.390**			9 Bulan	12.420.260	21 Bulan	30.418.952	175%	89%	KECAMATAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**12 Laporan**	600.000	-	0	12 Laporan	600.000	3 Laporan	0	3 Laporan	150.000	3 Laporan	150.000			9 Laporan	300.000	9 Laporan	300.000	75%	50%	KECAMATAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	33.600.000	48 Laporan	17.998.692	48 Laporan	33.600.000	12 Laporan	4.834.237	12 Laporan	2.929.633	12 Laporan	4.356.390			36 Laporan	12.120.260	84 Laporan	30.118.952	175%	90%	KECAMATAN SAWAHAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Sawana Dan Prasarana Barang Milik Daerah**	**12 Bulan**	139.276.100	**12 Bulan**	**143.197.950**	**12 Bulan**	**137.930.400**	**3 Bulan**	**14.495.000**	**3 Bulan**	**29.826.500**	**3 Bulan**	**35.140.000**			9 Bulan	79.461.500	21 Bulan	222.659.450	175%	160%	KECAMATAN SAWAHAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	40.000.000	3 Unit	28.455.000	3 Unit	40.003.200	0 Unit	4.785.000	1 Unit	13.321.000	1 Unit	5.805.000			2 Unit	23.911.000	5 Unit	52.366.000	166%	131%	KECAMATAN SAWAHAN
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	3.500.000	0 Unit	0	5 Unit	3.502.000	0 Unit	0	0 Unit	50.500	0 Unit	0			0 Unit	50.500	5 Unit	50.500	100%	1%	KECAMATA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**6 Unit**	24.000.000	6 Unit	46.295.400	6 Unit	22.650.000	0 Unit	0	1 Unit	2.580.000	3 Unit	15.000.000			4 Unit	17.580.000	10 Unit	63.875.400	166%	266%	KECAMATAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**4 Unit**	71.776.100	4 Unit	68.447.550	4 Unit	71.775.200	1 Unit	9.710.000	1 Unit	13.875.000	1 Unit	14.335.000			3 Unit	37.920.000	7 Unit	106.367.550	175%	148%	KECAMATAN SAWAHAN
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan**	**100%**	80.702.000	**75%**	**28.107.000**	**100%**	**116.735.000**	**0%**	**0**	**20,00%**	**2.040.000**	60%	**0**			60%	2.040.000	160%	30.147.000	160%	37%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Vertikal**	**6 Laporan**	73.772.000	**6 Kegiatan**	**27.142.000**	**6 Kegiatan**	109.805.000	**0 Kegiatan**	**0**	**2 Kegiatan**	**2.040.000**	**2 Kegiatan**	**0**			4 Kegiatan	2.040.000	10 Kegiatan	29.182.000	166%	40%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Dokumen	73.772.000	6 Laporan	27.142.000	6 Laporan	109.805.000	0 Laporan	0	1 Laporan	2.040.000	0 Laporan	0			1 Laporan	2.040.000	7 Laporan	29.182.000	350%	40%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Kegiatan Koordinsi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Terkait Pemeliharaan Sarana Dan**	**2 kegiatan**	5.000.000	-	**0**	**2 Kegiatan**	**5.000.000**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**			**0 Kegiatan**	0	2 Kegiatan	0	100%	0%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	**2 kegiatan**	5.000.000	-	0	2 Dokumen	5.000.000	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	0	100%	0%	KECAMATAN SAWAHAN

		Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Jumlah Warga Yang mendapat Pelayanan**	**2 kegiatan**	1.930.000	**1 Kegiatan**	**965.000**	**2 Kegiatan**	**1.930.000**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**			**0 Kegiatan**	0	2 kegiatan	965.000	100%	50%	KECAMATAN SAWAHAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	1 kegiatan	965.000	1 Laporan	965.000	1 Laporan	965.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0			0 Laporan	0	1 Laporan	965.000	100%	100%	KECAMATAN SAWAHAN
		Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 kegiatan	965.000	0 Laporan	0	1 Laporan	965.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0			0 Laporan	0	1 Laporan	0	100%	0%	KECAMATAN SAWAHAN
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan**	**15 kegiatan**	51.670.000	**15 Kegiatan**	**40.926.900**	**15 Kegiatan**	**51.670.000**	**3 Kegiatan**	**8.873.800**	**2 Kegiatan**	**3.640.000**	3 Kegiatan	**10.685.000**			8 Kegiatan	23.198.800	23 Kegiatan	64.125.700	153%	124%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan**	**15 kegiatan**	51.670.000	**15 Kegiatan**	**40.926.900**	**15 Kegiatan**	**51.670.000**	**3 Kegiatan**	**8.873.800**	**2 Kegiatan**	**3.640.000**	3 Kegiatan	**10.685.000**			8 Kegiatan	23.198.800	23 Kegiatan	64.125.700	153%	124%	KECAMATAN SAWAHAN
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga	35.000.000	8 Lembaga	26.500.500	8 Lembaga	35.000.000	4 Lembaga	6.673.800	2 Lembaga	3.640.000	1 Lembaga	825.000			7 Lembaga	11.138.800	15 Lembaga	37.639.300	187%	108%	KECAMATAN SAWAHAN
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15 Dokume	16.670.000	15 Dokumen	14.426.400	15 Dokumen	16.670.000	3 Dokumen	2.100.000	2 Dokumen	0	3 Dokumen	9.860.000			8 Dokumen	11.960.000	23 Kegiatan	26.386.400	153%	158%	KECAMATAN SAWAHAN
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	**PROGRAM KETENTRAMAN , KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat**	**3 kegiatan**	21.000.000	**-**	**0**	**3 Kegiatan**	**21.000.000**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**			**0 Kegiatan**	0	**0 Kegiatan**	0	0%	0%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Dan TNI**	**3 kegiatan**	21.000.000	**-**	**0**	**3 Kegiatan**	**21.000.000**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**			**0 Kegiatan**	0	**0 Kegiatan**	0	0%	0%	KECAMATAN SAWAHAN
		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**3 kegiatan**	21.000.000	-	0	3 Laporan	21.000.000	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0%	0%	KECAMATAN SAWAHAN
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persebtase Warga/Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**440 orang**	30.070.000	**4 Kegiatan**	**180.996.200**	**4 Kegiatan**	**120.067.800**	**1 Kegiatan**	**0**	**1 Kegiatan**	**2.930.000**	**1 Kegiatan**	**98.642.800**			3 Kegiatan	101.572.800	7 Kegiatan	282.569.000	190%	940%	KECAMATAN SAWAHAN
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Warga/Lembaga Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsan**	**440 orang**	30.070.000	**440 Orang**	**180.996.200**	**440 Orang**	**120.067.800**	**50 Orang**	**0**	**0 orang**	**2.930.000**	400 Orang	**98.642.800**			400 Orang	101.572.800	840 Orang	282.569.000	190%	940%	KECAMATAN SAWAHAN
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**4 Kegiatan**	30.070.000	440 Orang	180.996.200	440 Orang	120.067.800	50 Orang	0	0 Orang	2.930.000	400 Orang	98.642.800			400 Orang	101.572.800	840 Orang	282.569.000	190%	940%	KECAMATAN SAWAHAN
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kegiatan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	15 kegiatan	59.567.500	**15 Kegiatan**	**27.642.000**	**15 Kegiatan**	**59.567.500**	**2 Kegiatan**	**525.000**	**2 Kegiatan**	**825.000**	**3 Kegiatan**	**2.625.000**			7 Kegiatan	3.975.000	22 Dokumen	31.617.000	146%	53%	KECAMATAN SAWAHAN
		Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	15 kegiatan	59.567.500	**15 Kegiatan**	**27.642.000**	**15 Kegiatan**	**59.567.500**	**2 Dokumen**	**525.000**	**2 Dokumen**	**825.000**	**3 Dokumen**	**2.625.000**			7 Dokumen	3.975.000	22 Dokumen	31.617.000	146%	53%	KECAMATAN SAWAHAN
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 kegiatan	32.567.500	8 Dokumen	23.032.000	8 Dokumen	32.567.500	2 Dokumen	525.000	2 Dokumen	825.000	3 Dokumen	2.625.000			7 Dokumen	3.975.000	15 Dokumen	27.007.000	187%	83%	KECAMATAN SAWAHAN
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 kegiatan	12.000.000	3 Dokumen	4.610.000	3 Dokumen	12.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	3 Dokumen	4.610.000	100%	38%	KECAMATAN SAWAHAN

		Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4 kegiatan	15.000.000	-	0	4 Dokumen	15.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0%	0%	KECAMATAN SAWAHAN

Catatan : *)
Faktor Pendrong Keberhasilan Kinerja : Fungsional Umum di Kecamatan Sawahan sudah terbiasa dengan kegiatan yang belum ada Pejabat Strukturalnya
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja tahun berikutnya :

*) Disi oleh Kepala Bappeda

Disusun
Sawahan, 02 Oktober 2023
CAMAT SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK

[illegible]
Penata Tingkat I
19690715 199202 1 002

Dievaluasi
....., Tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
KAB/KOTA.....

PEMERINTAH **KABUPATEN** NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jl. Sedudo No. 96 Sawahan Kode Pos 64475
elepon (0358) 322324 Faks. 322324 e-mail : sawahan@nganjukkab.go.id
www.nganjukkab.go.id

Sawahan, 9 Januari 2024

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Nganjuk
di -
N G A N J U K

SURAT - PENGANTAR

Nomor : 050/31/411.517/2024

No	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun 2023 Kecamatan Sawahan.	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

CAMAT SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199002 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB I
PENDAHULUAN

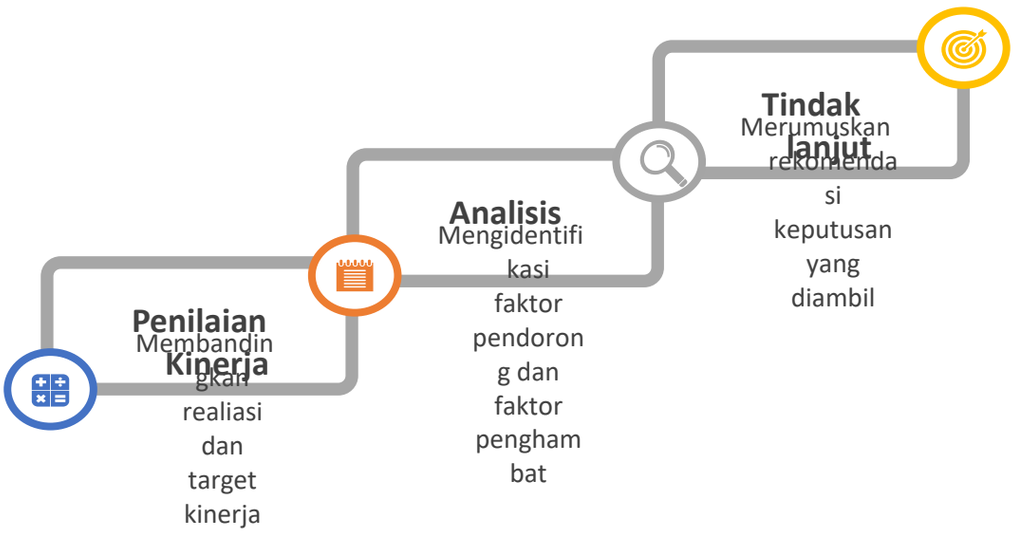
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sampai triwulan IV melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

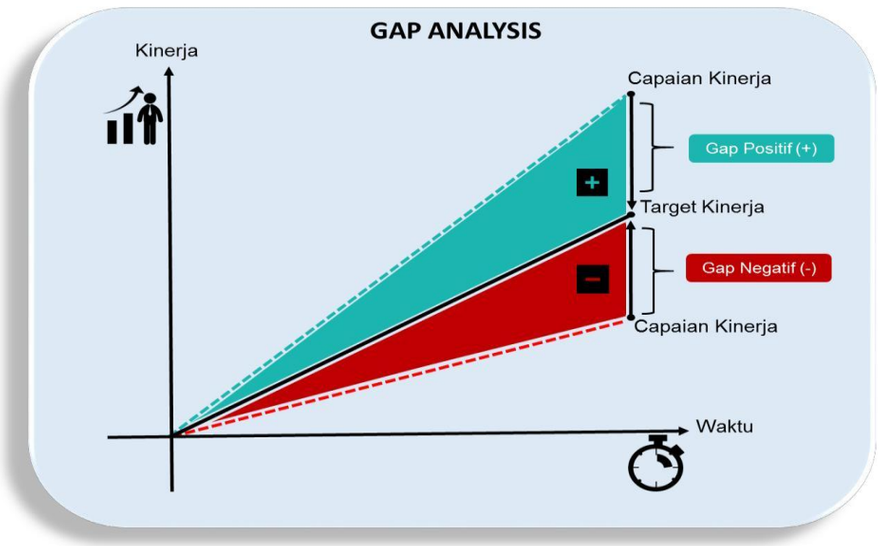
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.

2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

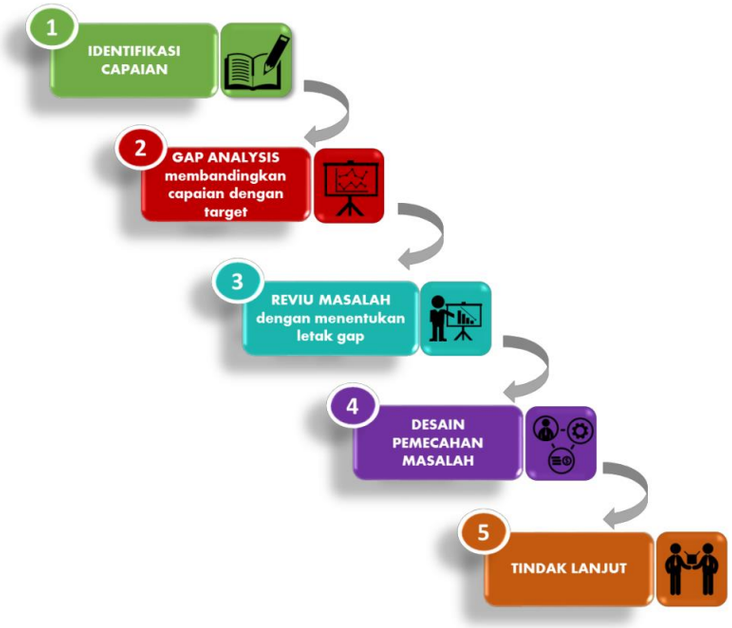
Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif

5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	91,58	106,4%
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	95,75%	95,75%
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**89,96**	**91,58**	**101,8%**
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kinerja SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
3	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peragkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunann Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	100%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Produktivitas Kinerja Dan Disiplin Pegawai	1 Laporan	1 Laporan	100%
14	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	22 Paket	100%
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	100%
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%
18	Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100%
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
22	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
23	Penata Usahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	6 Unit	6 Unit	100%
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100%

27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	100%
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Sawana Dan Prasarana Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	100%
32	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	100%
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	100%
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100%
35	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan**	**100%**	**83%**	**83%**
36	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Vertikal	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
37	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan	100%
38	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinsi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Terkait Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
39	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Warga Yang mendapat Pelayanan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100%
42	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	0 Laporan	0%
43	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan**	**15 Kegiatan**	**15 Kegiatan**	**100%**
44	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100%
45	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga	8 Lembaga	100%
46	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
47	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**100%**
48	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Dan TNI	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
49	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	3 Laporan	3 Laporan	100%

	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
50	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persebtase Warga/Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**4 Kegiatan**	**4 kegiatan**	**100%**
51	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Warga/Lembaga Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsan	440 Orang	440 Orang	100%
52	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	440 Orang	440 Orang	100%
53	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kegiatan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**15 Kegiatan**	**15 Kegiatan**	**100%**
54	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100%
55	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
56	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
57	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

1. Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2023

Untuk capaian kinerja Program Kecamatan Sawahan tahun 2023 triwulan IV ada Program yang realisasinya kurang dari 90% yaitu PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK dengan capaian 83% karena ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK dan Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III

Dan ada pula yang melebihi capaian pada target yang ditentukan, dikarenakan kurang tepatnya dalam penentuan target pada kegiatan dan sub kegiatan seperti PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan capaian 101,8%.

2. Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Untuk realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kecamatan Sawahan tahun 2023 triwulan IV ada yang tidak tercapai yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dikarenakan adanya keterbatasan staf dan Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III sehingga pada kegiatan dan sub kegiatan tidak terlaksana.

3. Analisis realisasi keuangan Perangkat Daerah Tahun 2023

Untuk realisasi keuangan Kecamatan Sawahan pada tahun 2023 triwulan IV yaitu sebesar Rp. 2.251.449.569,- dengan anggaran Rp. 2.915.769.850,- sehingga realisasi yang telah tercapai yaitu 77,22%

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat secara optimal	1. Keterbatasan staf yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban	1. Pola kerja yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif 2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan dengan Intansi Vertikal Terkait sehingga tercipta suasana kerja yang	1. Belum optimalnya partisipasi dari masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III

		kondusif dan nyaman	
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	1. Meningkatnya tertib administrasi desa dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 2. Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang siap dan mampu menduduki jabatan melalui seleksi pengisian lowongan secara terbuka dan akuntabel.	1. Belum maksimalnya perangkat desa yang memadai dalam pengelolaan Tata Pemerintahan Desa. 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-

5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
14	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
18	Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-

22	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
23	Penata Usahaan Arsip dinamis pada SKPD	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
25	Pengadaan Mebel	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
32	Pemeliharaan Mebel	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
35	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
36	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
37	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-

38	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
39	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	-
42	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	ASN Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat	1. Ada beberapa kegiatan yang kurang tepat dalam penetapan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ada 2. Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III 3. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
43	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para perangkat desa dan masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman	-
44	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para perangkat desa dan masyarakat sehingga tercipta suasana	-
45	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para perangkat desa dan masyarakat sehingga tercipta suasana	-
46	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para perangkat desa dan masyarakat sehingga tercipta suasana	-
47	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Hubungan yang baik dan harmonis dengan FORPINCAM, perangkat desa, lembaga, dan masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman.	-
48	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Hubungan yang baik dan harmonis dengan FORPINCAM, perangkat desa, lembaga, dan masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman.	-
49	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Hubungan yang baik dan harmonis dengan FORPINCAM, perangkat desa, lembaga, dan masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman.	-
50	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Hubungan yang baik dan harmonis dengan FORPINCAM, perangkat desa, lembaga, dan masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman.	-
51	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hubungan yang baik dan harmonis dengan FORPINCAM, perangkat desa, lembaga, dan masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman.	-
52	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Hubungan yang baik dan harmonis dengan FORPINCAM, perangkat desa, lembaga, dan masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman.	-

53	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Dan Pengawasan pada Pemerintahan Desa, agar desa dapat berkembang dengan baik	-
54	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Dan Pengawasan pada Pemerintahan Desa, agar desa dapat berkembang dengan baik	-
55	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Dan Pengawasan pada Pemerintahan Desa, agar desa dapat berkembang dengan baik	-
56	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Dan Pengawasan pada Pemerintahan Desa, agar desa dapat berkembang dengan baik	-
57	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Dan Pengawasan pada Pemerintahan Desa, agar desa dapat berkembang dengan baik	-

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

IV.2. Tindak Lanjut

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Kecamatan Sawahan Kabupaten/Kota Nganjuk
Periode Pelaksanaan: Tribulan IV Tahun Anggaran 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 86
2. Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang : 100%
3. Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan y : 100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi(2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggunjawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**89,69**	**2.495.411.550**	**76,6**	**2.088.515.933**	**89,96**	**2.496.071.550**	**82,98**	**246.674.413**	**91,58**	**638.648.011**	**91,58**	**394.642.710**	**91,58**	**650.298.385**	**91,92**	**1.930.263.519**	**91,92**	**4.018.779.452**	**102%**	**161%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kinerja SKPD**	**7 Dokumen**	**1.200.000**	**8 Dokumen**	**820.900**	**8 Dokumen**	**1.200.000**	**6 Dokumen**	**800.000**	**0 Dokumen**	**0**	**0 Dokumen**	**0**	**2 Dokumen**	**400.000**	**8 Dokumen**	**1.200.000**	**16 Dokumen**	**2.020.900**	**228%**	**168%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Penyusunana dokumen perencanan perangkat daerah (Kec. sawahan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Peragkat Daerah	2 Dokumen	200.000	2 Dokumen	171.150	2 Dokumen	200.000	2 Dokumen	200.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	200.000	4 Dokumen	371.150	200%	186%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	149.950	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	200.000	2 Dokumen	349.950	200%	175%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	149.950	1 Dokumen	200.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	2 Dokumen	349.950	200%	175%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	199.900	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	200.000	2 Dokumen	399.900	200%	200%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi dan penyusunan dokumen Peerubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	149.950	1 Dokumen	200.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	2 Dokumen	349.950	200%	175%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunann Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Dokumen	200.000	1 Laporan	0	2 Laporan	200.000	2 Laporan	200.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	200.000	3 Laporan	200.000	150%	100%	KECAMATAN SAWAHAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Keuangan SKPD**	**12 bulan**	**2.212.569.000**	**12 Bulan**	**1.823.670.841**	**12 Bulan**	**2.212.569.000**	**3 Bulan**	**216.084.826**	**3 Bulan**	**590.297.078**	**3 Bulan**	**335.915.170**	**3 Bulan**	**534.320.895**	**12 Bulan**	**1.676.617.969**	**24 Bulan**	**3.500.288.810**	**200%**	**158%**	KECAMATAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.211.169.000	17 Orang/Bul	1.822.730.841	22 Orang/B	2.211.169.000	13 Orang/Bul	216.084.826	12 Orang/Bul	590.297.078	12 Orang/Bul	335.915.170	17 Orang/Bul	534.120.895	22 Orang/Bul	1.676.417.969	22 Orang/Bulan	3.499.148.810	200%	158%	KECAMATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.200.000	1 Laporan	840.000	1 Laporan	1.200.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	2 Laporan	840.000	200%	70%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	200.000	12 Laporan	100.000	12 Laporan	200.000	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	200.000	12 Laporan	200.000	24 Laporan	300.000	200%	150%	KECAMATAN SAWAHAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Produktivitas Kinerja Dan Disiplin Pegawai**	**1 Laporan**	**15.596.400**	**1 Laporan**	**9.939.200**	**1 Laporan**	**15.596.400**	**0 Laporan**	**0**	**0 Laporan**	**0**	**0 Laporan**	**0**	**1 Laporan**	**9.377.000**	**1 Laporan**	**9.377.000**	**2 Laporan**	**19.316.200**	**200%**	**124%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	9.596.400	22 Paket	9.939.200	22 Paket	9.596.400	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	22 Paket	9.377.000	22 Paket	9.377.000	44 Paket	19.316.200	200%	201%	KECAMATAN
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	6 Orang	6.000.000	-	0	6 Orang	6.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	6 Orang	0	6 Orang	0	6 Orang	0	100%	0%	KECAMATAN SAWAHAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum SKPD**	**12 bulan**	**73.330.050**	**12 Bulan**	**43.438.350**	**12 Bulan**	**68.225.750**	**3 Bulan**	**10.460.350**	**3 Bulan**	**15.444.800**	**3 Bulan**	**19.081.150**	**3 Bulan**	**23.116.950**	**12 Bulan**	**68.103.250**	**24 Bulan**	**111.541.600**	**200%**	**152%**	KECAMATAN

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.500.000	5 Paket	2.500.000	5 Paket	2.500.000	1 Paket	785.400	1 Paket	729.800	1 Paket	984.800	2 Paket	0	5 Paket	2.500.000	10 Paket	5.000.000	200%	200%	KECAMATAN SAWAHAN
		Penyediaaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	3.370.050	8 Paket	2.698.650	8 Paket	3.370.050	2 Paket	923.300	2 Paket	682.450	2 Paket	975.350	2 Paket	788.950	8 Paket	3.370.050	16 Paket	6.068.700	200%	180%	KECAMATAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**3 Paket**	45.000.000	3 Paket	31.684.200	3 Paket	45.635.700	1 Paket	7.853.400	1 Paket	11.801.550	1 Paket	10.642.750	0 Paket	15.215.500	3 Paket	45.513.200	6 Paket	77.197.400	200%	172%	KECAMATAN
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.500.000	2 Paket	2.325.500	2 Paket	3.500.000	0 Paket	78.250	1 Paket	361.000	1 Paket	878.250	0 Paket	2.182.500	2 Paket	3.500.000	4 Paket	5.825.500	200%	166%	KECAMATAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	750.000	0 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	750.000	1 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	6.000.000	200%	200%	KECAMATAN SAWAHAN
		Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9.000.000	12 Laporan	1.230.000	12 Laporan	9.020.000	3 Laporan	820.000	3 Laporan	820.000	3 Laporan	4.100.000	3 Laporan	3.280.000	12 Laporan	9.020.000	24 Laporan	10.250.000	200%	114%	KECAMATAN
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6 Dokumen	1.200.000	-	0	6 Dokumen	1.200.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	300.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	900.000	6 Dokumen	1.200.000	6 Dokumen	1.200.000	100%	100%	KECAMATAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**6 Jenis**	**25.000.000**	**6 Unit**	**49.450.000**	**6 Unit**	**26.350.000**	**0 Unit**	**0**	**0 Unit**	**0**	**0 Unit**	**0**	**6 Unit**	**26.125.000**	**6 Unit**	**26.125.000**	**12 Unit**	**75.575.000**	**200%**	**302%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**2 Unit**	9.000.000	2 Unit	49.450.000	2 Unit	9.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	8.850.000	2 Unit	8.850.000	4 Unit	58.300.000	200%	648%	KECAMATAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**4 Unit**	16.000.000	-	0	4 Unit	17.350.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	17.275.000	4 Unit	17.275.000	0 Unit	17275000	0%	108%	KECAMATAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang SKPD**	**12 Bulan**	**34.200.000**	**12 Bulan**	**17.998.692**	**12 Bulan**	**34.200.000**	**3 Bulan**	**4.834.237**	**3 Bulan**	**3.079.633**	**3 Bulan**	**4.506.390**	**3 Bulan**	**5.133.990**	**12 Bulan**	**17.554.250**	**24 Bulan**	**35.552.942**	**200%**	**104%**	KECAMATAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**12 Laporan**	600.000	-	0	12 Laporan	600.000	3 Laporan	0	3 Laporan	150.000	3 Laporan	150.000	3 Laporan	300.000	12 Laporan	600.000	12 Laporan	600.000	100%	100%	KECAMATAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	33.600.000	48 Laporan	17.998.692	48 Laporan	33.600.000	12 Laporan	4.834.237	12 Laporan	2.929.633	12 Laporan	4.356.390	12 Laporan	4.833.990	48 Laporan	16.954.250	96 Laporan	34.952.942	200%	104%	KECAMATAN SAWAHAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Sawana Dan Prasarana Barang Milik Daerah**	**12 Bulan**	**139.276.100**	**12 Bulan**	**143.197.950**	**12 Bulan**	**137.930.400**	**3 Bulan**	**14.495.000**	**3 Bulan**	**29.826.500**	**3 Bulan**	**35.140.000**	**3 Bulan**	**51.824.550**	**12 Bulan**	**131.286.050**	**24 Bulan**	**274.484.000**	**200%**	**197%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	40.000.000	3 Unit	28.455.000	3 Unit	40.003.200	0 Unit	4.785.000	1 Unit	13.321.000	1 Unit	5.805.000	1 Unit	15.767.850	3 Unit	39.678.850	6 Unit	68.133.850	200%	170%	KECAMATAN SAWAHAN
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	3.500.000	0 Unit	0	5 Unit	3.502.000	0 Unit	0	0 Unit	50.500	0 Unit	0	5 Unit	3.451.500	5 Unit	3.502.000	5 Unit	3.502.000	200%	100%	KECAMATA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**6 Unit**	24.000.000	6 Unit	46.295.400	6 Unit	22.650.000	0 Unit	0	1 Unit	2.580.000	3 Unit	15.000.000	2 Unit	5.070.000	6 Unit	22.650.000	12 Unit	68.945.400	200%	287%	KECAMATAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**4 Unit**	71.776.100	4 Unit	68.447.550	4 Unit	71.775.200	1 Unit	9.710.000	1 Unit	13.875.000	1 Unit	14.335.000	1 Unit	27.535.200	4 Unit	65.455.200	8 Unit	133.902.750	200%	187%	KECAMATAN SAWAHAN
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan**	**100%**	**80.702.000**	**75%**	**28.107.000**	**100%**	**116.735.000**	**0%**	**0**	**20,00%**	**2.040.000**	**60%**	**0**	**83%**	**105.069.450**	**83%**	**107.109.450**	**158%**	**135.216.450**	**158%**	**168%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Vertikal**	**6 Laporan**	**73.772.000**	**6 Kegiatan**	**27.142.000**	**6 Kegiatan**	**109.805.000**	**0 Kegiatan**	**0**	**2 Kegiatan**	**2.040.000**	**2 Kegiatan**	**0**	**2 Kegiatan**	**99.104.450**	**6 Kegiatan**	**101.144.450**	**12 Kegiatan**	**128.286.450**	**200%**	**174%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Dokumen	73.772.000	6 Laporan	27.142.000	6 Laporan	109.805.000	0 Laporan	0	2 Laporan	2.040.000	2 Laporan	0	2 Laporan	99.104.450	6 Laporan	101.144.450	12 Laporan	128.286.450	600%	174%	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Kegiatan Koordinsi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Terkait Pemeliharaan Sarana Dan**	**2 kegiatan**	**5.000.000**	-	**0**	**2 Kegiatan**	**5.000.000**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**	**2 Kegiatan**	**5.000.000**	**2 Kegiatan**	**5.000.000**	**2 Kegiatan**	**5000000**	**100%**	**100%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	**2 kegiatan**	5.000.000	-	0	2 Dokumen	5.000.000	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Kegiatan	5000000	100%	100%	KECAMATAN SAWAHAN

		Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Jumlah Warga Yang mendapat Pelayanan**	**2 kegiatan**	**1.930.000**	**1 Kegiatan**	**965.000**	**2 Kegiatan**	**1.930.000**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**	**1 Kegiatan**	**965.000**	**1 Kegiatan**	**965.000**	**2 kegiatan**	**1.930.000**	**100%**	**100%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	1 kegiatan	965.000	1 Laporan	965.000	1 Laporan	965.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	965.000	1 Laporan	965.000	2 Laporan	1.930.000	200%	200%	KECAMATAN SAWAHAN
		Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 kegiatan	965.000	0 Laporan	0	1 Laporan	965.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0%	0%	KECAMATAN SAWAHAN
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan**	**15 kegiatan**	**51.670.000**	**15 Kegiatan**	**40.926.900**	**15 Kegiatan**	**51.670.000**	**3 Kegiatan**	**8.873.800**	**2 Kegiatan**	**3.640.000**	**3 Kegiatan**	**10.685.000**	**7 Kegiatan**	**15.350.000**	**15 Kegiatan**	**38.548.800**	**30 Kegiatan**	**79.475.700**	**200%**	**154%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan**	**15 kegiatan**	**51.670.000**	**15 Kegiatan**	**40.926.900**	**15 Kegiatan**	**51.670.000**	**3 Kegiatan**	**8.873.800**	**2 Kegiatan**	**3.640.000**	**3 Kegiatan**	**10.685.000**	**7 Kegiatan**	**15.350.000**	**15 Kegiatan**	**38.548.800**	**30 Kegiatan**	**79.475.700**	**200%**	**154%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga	35.000.000	8 Lembaga	26.500.500	8 Lembaga	35.000.000	4 Lembaga	6.673.800	2 Lembaga	3.640.000	1 Lembaga	825.000	1 Lembaga	13.250.000	8 Lembaga	24.388.800	16 Lembaga	50.889.300	200%	145%	KECAMATAN SAWAHAN
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15 Dokume	16.670.000	15 Dokumen	14.426.400	15 Dokumen	16.670.000	3 Dokumen	2.100.000	2 Dokumen	0	3 Dokumen	9.860.000	7 Dokumen	2.100.000	15 Dokumen	14.060.000	30 Kegiatan	28.486.400	200%	171%	KECAMATAN SAWAHAN
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	**PROGRAM KETENTRAMAN , KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat**	**3 kegiatan**	**21.000.000**	**-**	**0**	**3 Kegiatan**	**21.000.000**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**	**3 Kegiatan**	**20.215.000**	**3 Kegiatan**	**20.215.000**	**3 Kegiatan**	**20215000**	**100%**	**96%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Dan TNI**	**3 kegiatan**	**21.000.000**	**-**	**0**	**3 Kegiatan**	**21.000.000**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**	**0 Kegiatan**	**0**	**3 Kegiatan**	**20.215.000**	**3 Kegiatan**	**20.215.000**	**3 Kegiatan**	**20215000**	**100%**	**96%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**3 kegiatan**	21.000.000	-	0	3 Laporan	21.000.000	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	3 Laporan	20.215.000	3 Laporan	20.215.000	3 Laporan	20215000	100%	96%	KECAMATAN SAWAHAN
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persebtase Warga/Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**440 orang**	**30.070.000**	**4 Kegiatan**	**180.996.200**	**4 Kegiatan**	**120.067.800**	**1 Kegiatan**	**0**	**1 Kegiatan**	**2.930.000**	**1 Kegiatan**	**98.642.800**	**1 Kegiatan**	**12.770.000**	**4 kegiatan**	**114.342.800**	**8 Kegiatan**	**295.339.000**	**200%**	**982%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Warga/Lembaga Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsan**	**440 orang**	**30.070.000**	**440 Orang**	**180.996.200**	**440 Orang**	**120.067.800**	**40 Orang**	**0**	**0 orang**	**2.930.000**	**400 Orang**	**98.642.800**	**0 orang**	**12.770.000**	**440 Orang**	**114.342.800**	**880 Orang**	**295.339.000**	**200%**	**982%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**4 Kegiatan**	30.070.000	440 Orang	180.996.200	440 Orang	120.067.800	40 Orang	0	0 Orang	2.930.000	400 Orang	98.642.800	0 Orang	12.770.000	440 Orang	114.342.800	880 Orang	295.339.000	200%	982%	KECAMATAN SAWAHAN
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kegiatan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**15 kegiatan**	**59.567.500**	**15 Kegiatan**	**27.642.000**	**15 Kegiatan**	**59.567.500**	**2 Kegiatan**	**525.000**	**2 Kegiatan**	**825.000**	**3 Kegiatan**	**2.625.000**	**8 Kegiatan**	**36.995.000**	**15 Kegiatan**	**40.970.000**	**30 Dokumen**	**68.612.000**	**200%**	**115%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**15 kegiatan**	**59.567.500**	**15 Kegiatan**	**27.642.000**	**15 Kegiatan**	**59.567.500**	**2 Dokumen**	**525.000**	**2 Dokumen**	**825.000**	**3 Dokumen**	**2.625.000**	**8 Kegiatan**	**36.995.000**	**15 Kegiatan**	**40.970.000**	**30 Dokumen**	**68.612.000**	**200%**	**115%**	KECAMATAN SAWAHAN
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 kegiatan	32.567.500	8 Dokumen	23.032.000	8 Dokumen	32.567.500	2 Dokumen	525.000	2 Dokumen	825.000	3 Dokumen	2.625.000	8 Dokumen	21.005.000	8 Dokumen	24.980.000	16 Dokumen	48.012.000	200%	147%	KECAMATAN SAWAHAN
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 kegiatan	12.000.000	3 Dokumen	4.610.000	3 Dokumen	12.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	10.725.000	3 Dokumen	10.725.000	6 Dokumen	15.335.000	200%	128%	KECAMATAN SAWAHAN

		Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4 kegiatan	15.000.000	-	0	4 Dokumen	15.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	5.265.000	4 Dokumen	5.265.000	4 Dokumen	5265000	100%	35%	KECAMATAN SAWAHAN

Catatan : *)
Faktor Pendrong Keberhasilan Kinerja : Fungsional Umum di Kecamatan Sawahan sudah terbiasa dengan kegiatan yang belum ada Pejabat Strukturalnya
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Pejabat Struktural yang membidangi baru terisi pada akhir TW III
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja tahun berikutnya :

*) Disi oleh Kepala Bappeda

Disusun
Sawahan, 09 Januari 2024
CAMAT SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK

IMAM BAIDOWI, S.Sos
Penata Tingkat I
19690715 199202 1 002

Dievaluasi
....., Tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
KAB/KOTA.....

BERITA ACARA
ASISTENSI DAN VERIFIKASI LKJIP PERANGKAT DAERAH TA. 2023

I. Pada hari ini, Senin Tanggal 22 Januari 2024 telah dilaksanakan asistensi dan verifikasi terhadap draft LKjIP Perangkat Daerah Lec. Sawah Adapun catatan perbaikan terhadap penyajian/pengungkapan data pelaporan kinerja sebagai berikut :

No	Uraian	Catatan Perbaikan
1.	Format belum sesuai	BAB I terutama disesuaikan dengan format
2.	Penyesuaian draft tabel perlu disesuaikan dengan renstra	Tabel 2.1 Tabel 3.1.2 Tabel 3.1.3.2 Tabel 3.1.6 Tabel 3.A.7.
2.	Analisa perlu dipertajam dan dipenjelas	Analisa keberhasilan dan kegagalan
3.	Bukti dukung terkait dengan indikator sasaran desa yg menerapkan teknologi baru belum ada	Deskripsi kegiatan saja mengan kutipan indikator EPDESKEL

II. Perangkat Daerah agar memperbaiki draft LKjIP sesuai catatan perbaikan dan menyampaikan kembali kepada petugas asistensi (PIC) untuk memastikan perbaikannya. Adapun untuk timeline dan skoring tetap mengacu pada ketentuan dalam surat Sekretaris Daerah tanggal 15 Januari 2024 Nomor : 069/88/411.000/2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023.

Perangkat Daerah Lec. Sawah

Petugas Asistensi (PIC)

.....

NIP.

Nurul Hudha P.

NIP. 19850401 2009 12 1005

PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KECAMATAN SAWAHAN

-- TAHUN 2023 --

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN SAWAHAN

Jl. Sedudo No. 96 Sawahan Kode Pos 64475

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat bimbingan dan rahmat-Nya, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Tahun 2023 Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk telah disusun secara sistematis yang memuat tentang program/kegiatan, namun demikian alur pelaporan akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang terdapat dalam LKjIP tahun 2023 ini kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun 2023. Kami berharap bahwa LKjIP ini tetap dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pihak eksekutif maupun legislatif Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya LKjIP ini dapat dijadikan acuan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada masa-masa mendatang.

Sawahan, 16 Januari 2024
Camat Sawahan

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199002 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang / Gambaran Umum 1
B. Landasan Hukum 3
C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 3
D. Isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi 5
E. Sistematika Penulisan 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA 7
A. Rencana Strategis Organisasi 7
B. Perjanjian Kinerja 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12
A. Capaian Kinerja Organisasi 12
3.A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) 13
3.A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Tahun-tahun sebelumnya 15
3.A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra 17
3.A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/ Provinsi/kabupaten yang berbatasan) 19
3.A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 19
3.A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 21
3.A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Kinerja 22
B. Realisasi Anggaran 26
BAB IV PENUTUP 30
A. Kesimpulan 30
B. Saran 30

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Penduduk Kecamatan Sawahan 2
2. Tabel 2.1 Sasaran Strategis, indikator dan target kinerja tahun 2023 9
3. Tabel 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 13
4. Tabel 3.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun (n) dan Tahun (n-1, n-2)..... 15
5. Tabel 3.1.3.1 Target Kinerja Renstra 17
6. Tabel 3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (n) dengan Target Akhir Renstra 17
7. Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Standard Nasional..... 19
8. Tabel 3.1.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 19
9. Tabel 3.1.6 Analisis Penggunaan Sumber Daya 21
10. Tabel 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 22
11. Tabel 3.2 Realisasi Anggaran 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.A. Latar Belakang / Gambaran Umum

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sawahan mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Sawahan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

Kecamatan Sawahan merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Sawahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk terletak di bagian selatan dari pusat Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dengan ketinggian ± 700 m dari permukaan laut, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1) Sebelah Utara : Kecamatan Wilangan dan Berbek Kabupaten Nganjuk
2) Sebelah Timur : Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
3) Sebelah Selatan : Kabupaten Trenggalek
4) Sebelah Barat : Kabupaten Madiun dan Ponorogo

Luas wilayah Kecamatan Sawahan adalah 11.588,60 Ha, dengan tata guna tanah meliputi :

1) Tanah Sawah : 1.124,50 Ha
2) Tanah Tegal, dll : 1.518,37 Ha
3) Tanah Bangunan dan halaman : 954,30 Ha
4) Tanah Hutan : 7.916,70 Ha
5) Tanah lain-lain : 74,73 Ha

Secara administratif Kecamatan Sawahan terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu :

1) Desa Ngliman
2) Desa Bareng
3) Desa Sawahan
4) Desa Bendolo
5) Desa Duren
6) Desa Sidorejo
7) Desa Margopatut
8) Desa Siwalan
9) Desa Kebonagung

Sedangkan jumlah data penduduk tahun 2022 adalah 39.604 jiwa terdiri dari laki-laki 19.962 jiwa dan perempuan 19.642 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penduduk Kecamatan Sawahan

No.	Desa	Jumlah Penduduk			Ket.
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Ngliman	2.005	1.961	3.966	-
2	Bareng	2.066	2.144	4.210	-
3	Sawahan	2.672	2.0606	5.278	-
4	Bendolo	763	733	1.496	-

5	Duren	3.055	2.939	5.994	-
6	Sidorejo	1.342	1.312	2.654	-
7	Margopatut	4.826	4.740	9.566	-
8	Siwalan	785	802	1.587	-
9	Kebonagung	2.448	2.405	4.853	-
Jumlah		19.962	19.642	39.604	-

Sumber : Kecamatan Sawahan Dalam Angka 2023

1.B. Landasan Hukum

a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;

b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

d) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023;

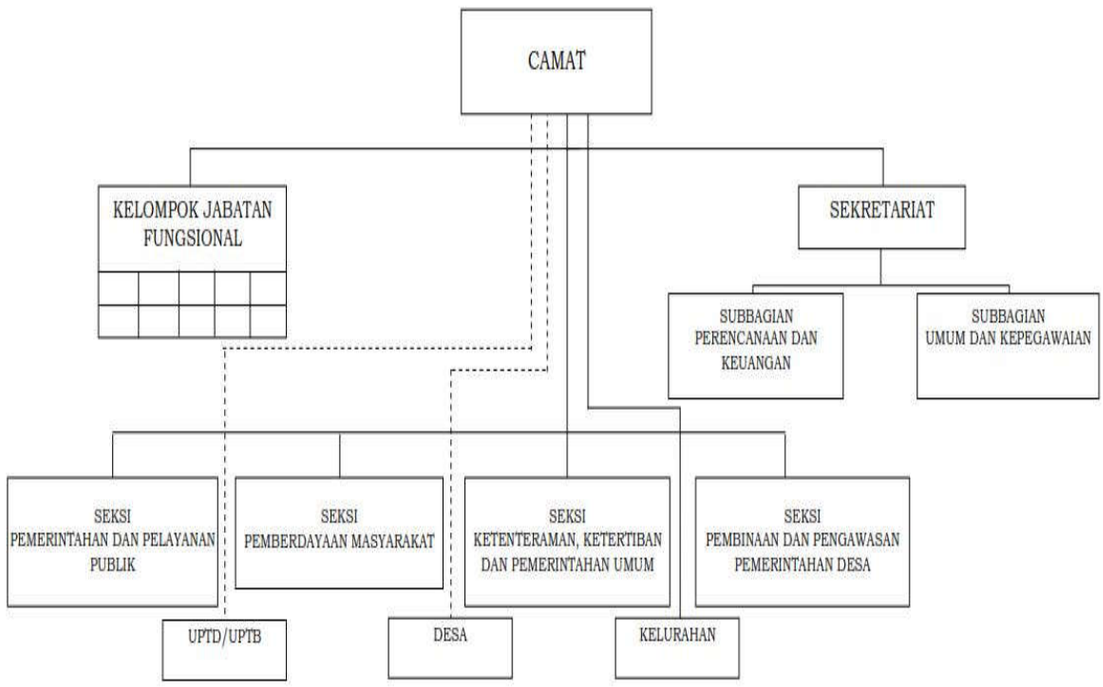
1.C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Sekretariat, terdiri atas:
   1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Seksi, terdiri atas:
   1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
   2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
   3. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum; dan
   4. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
c. Kelurahan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



Sedangkan Rincian Tugas Dan Fungsi Camat adalah :

I. Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

II. Fungsi

Camat menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

1.D. Isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Sawahan diperoleh dengan mengakomodasi isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 2019-2023, sebagai berikut:

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Sedangkan Permasalahan Utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Sawahan

1) Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik
2) Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
3) Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif
4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5) Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa

1.E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam pelaporan LKjIP 2023, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang / Gambaran Umum
- B. Landasan Hukum
- C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi
- E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Organisasi
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Rencana Strategis pemerintah Kecamatan Sawahan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, sedangkan RPJMD tersebut harus selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Nganjuk, sebagaimana terdapat dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025.

Mengacu pada Visi RPJPD Kabupaten Nganjuk tersebut, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada misi ke 2 yaitu Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel *(accountable)* demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

Hal ini menjabarkan letak geografis Kabupaten Nganjuk yang cukup strategis dan mempunyai potensi sumber daya alam yang belum maksimal dalam pengelolaannya, diantaranya adalah sector pertanian, sektor peternakan dan sektor pariwisata dan apabila ini dikelola secara optimal akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan kwalitas hidup yang layak kecukupan kebutuhan dasar yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja dengan didukung infrastruktur social budaya, ekonomi yang memadahi dengan tetap menjunjung keragaman budaya, nilai-nilai teleransi gotong royong dalam bingkai persaudaraan untuk memperkuat ikatan social masyarakat.

Adapun Misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
b. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
d. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna ;
e. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata ;
f. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Sedangkan untuk Pemerintahan Kecamatan Sawahan akan menjabarkan Misi ke-2 yang dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kecamatan Sawahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai adalah Meningkatnya sinergitas penyelengggaraan tugas-tugas Pemerintahan Kecamatan, dengan indikator yaitu berupa nilai sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 mempunyai sasaran strategis :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
   Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban.
   Indikator : Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti.
c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.
   Indikator : Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indkator dan Target Kinerja Kecamatan Sawahan

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Th.Awal	Target Akhir Periode Restra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Th.Awal	Target					Target Akhir Periode Renstra
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	2475,8	BAIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	85,69	85,70	85,72	85,7	85,78	86,00	86,00
					Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sawahan merupakan lndikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra OPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk 2018-2023 dengan mengambil target tahun 2023.

2.B PERJANJIAN KINERJA

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Sawahan 2023 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja terdiri dari tiga sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan masyarakat
2. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban dengan indikator Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, kamtibum, kesmas, sarpras dan pemberayaan masyarakat yang ditindaklanjuti
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan indikator Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 2.865.111.850,- sebelum perubahan, sedangkan anggaran setelah perubahan Rp 2.915.769.850,- yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Camat Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. *(Terlampir)*

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sawahan 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	86,00
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan	100 %

	pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.496.071.550	APBD 2023
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	116.735.000	APBD 2023
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	51.670.000	APBD 2023
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	21.000.000	APBD 2023
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	120.067.800	APBD 2023
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.567.500	APBD 2023

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sawahan merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Sawahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Sawahan Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Sawahan Tahun 2023, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Sawahan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik

III	55 % sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

3.A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n)

Tabel 3.1.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun (2023)	Capaian (%)
1	**2**	**3**	4	5	6
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	BAIK (75-100)	80,90	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	86	91,58	106,5 %
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	95,75 %	95,75 %
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100 %	100 %	100 %

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

  Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 terealisasi “Sangat Baik” dari target yang ditetapkan “Baik” dengan prosentase capaiannya sebesar 106,5 %.

  Capaian indikator sasaran dapat diperoleh dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan, serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Melakukan pembinaan dan

pengawasan tertib administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik) yang merupakan aplikasi untuk bisa mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara tepat dan cepat oleh seluruh penyedia pelayanan publik. Sedangkan kebijakannya yakni menerima masukan maupun saran dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti lewat pengaduan melalui kotak saran atau saran yang disampaikan pada survei kepuasan masyarakat dan menyediakan kebutuhan administrasi perkantoran dengan melalui program pelayanan administrasi perkantoran.

- ***Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti***

  Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2023 terealisasi “Baik” dari target yang ditetapkan “Baik” dengan prosentase capaiannya sebesar 95,75 %.

  Capaian indikator sasaran masih mendapatkan kategori Baik meskipun target terealisasi masih dibawah dari target yang ditentukan yaitu 100%. Hal ini dikarenakan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat tidak bisa melaksanakan dikarenakan kurang personel yang mampu melaksanakan dan jabatan yang membidangi baru terisi pada tribulan IV sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang tersebut tidak bisa maksimal.

- ***Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik***

  Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2023 terealisasi “Baik” dari target yang ditetapkan “Baik” dengan prosentase capaiannya sebesar 100%.

  Capaian indikator sasaran sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan indikator desa pada Kecamatan Sawahan yang menyelesaikan administrasi desa tepat waktu mencapai 100%, sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%. Penilaian ini didasarkan pada hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kemendes dengan hasil 7 Desa kategori Maju dan 2 Desa kategori Mandiri. *(Terlampir)*

  Epdeskel Tahun 2023 Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

Desa/Kel	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan
Bendolo	199	72	172	443	Berkembang

Sawahan	214	78	184	476	Cepat Berkembang
Ngliman	214	75	178	467	Cepat Berkembang
Bareng	217	97	187	501	Cepat Berkembang
Sidorejo	218	80	200	498	Cepat Berkembang
Duren	208	79	181	468	Cepat Berkembang
Siwalan	195	78	177	450	Berkembang
Margopatut	218	96	190	504	Cepat Berkembang
Kebonagung	195	71	187	453	Cepat Berkembang

Indeks Desa Membangun(IDM) Tahun 2023 Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
351801	SAWAHAN	3518012001	BENDOLO	0,76	0,5667	0,8	0,7089	MAJU
351801	SAWAHAN	3518012002	SAWAHAN	0,84	0,9	0,6	0,78	MAJU
351801	SAWAHAN	3518012003	NGLIMAN	0,7486	0,7167	1	0,8217	MANDIRI
351801	SAWAHAN	3518012004	BARENG	0,8629	0,75	0,8	0,8043	MAJU
351801	SAWAHAN	3518012005	SIDOREJO	0,8571	0,6667	0,6667	0,7302	MAJU
351801	SAWAHAN	3518012006	DUREN	0,8171	0,7	0,9333	0,8168	MANDIRI
351801	SAWAHAN	3518012007	SIWALAN	0,7771	0,7833	0,8667	0,809	MAJU
351801	SAWAHAN	3518012008	MARGOPATUT	0,8343	0,7167	0,6667	0,7392	MAJU
351801	SAWAHAN	3518012009	KEBONAGUNG	0,7886	0,6667	0,8	0,7517	MAJU

Sumber : kemendesa.go.id

3.A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2023) dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2023) dan Tahun (2022, 2021)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)
1	**2**	**3**	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	BAIK	BAIK	80,90	BAIK	BAIK	80,90
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	85,76	85,78	86	80,75	76,60	91,58
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan,	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum,	100%	100%	100%	100%	100%	95,57%

	pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti						
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

  Indeks kepuasan pada (2021) dan (2022) masih dibawah target dikarenakan kurang pemahaminya aplikasi SUKMA-e dan belum memadainya/kurangnya personel dari segi jumlah dan kemampuan di Kecamatan Sawahan.

  Di tahun 2023 terealisasi melebihi target yang ditetapkan karena sudah memadainya aparatur di Kecamatan Sawahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e dan keaktifan dalam mengisi aplikasi tersebut.

- ***Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti***

  Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti pada (2021) dan (2022) sudah sesuai target sebesar 100% sedangkan tahun 2023 terealisasi dengan prosentase capaiannya sebesar 95,75 %. Hal ini dikarenakan kurangnya aparatur dan pejabat yang membidangi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud serta sarana prasarana penunjang yang belum memadai (rusak).

- ***Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik***

  Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik pada (2021) dan (2022) maupun pada tahun n sudah sesuai target sebesar 100%. Capaian indikator sasaran sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan indikator seluruh desa (9 Desa) pada Kecamatan Sawahan yang menyelesaikan administrasi desa tepat waktu mencapai 100%. Penilaian ini didasarkan pada hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kemendes.

3.A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2023) dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	**2**	**3**	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	85,70	85,72	85,76	85,78	86,00
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2023) dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun (2023)	Tingkat Kemajuan (%)
1	**2**	**3**	4	5	6
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	BAIK (75-100)	80,90	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	86,00	91,58	106,5 %
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan	100%	95,75 %	95,75 %

		masyarakat yang ditindak lanjuti			
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100 %	100 %

Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 terealisasi "Sangat Baik" dari target yang ditetapkan "Baik" dengan prosentase capaiannya sebesar 106,5 %.

Capaian indikator sasaran dapat diperoleh dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan, serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik) yang merupakan aplikasi untuk bisa mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara tepat dan cepat oleh seluruh penyedia pelayanan publik. Sedangkan kebijakannya yakni menerima masukan maupun saran dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti lewat pengaduan melalui kotak saran atau saran yang disampaikan pada survei kepuasan masyarakat dan menyediakan kebutuhan administrasi perkantoran dengan melalui program pelayanan administrasi perkantoran

- ***Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti***

Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2023 terealisasi "Baik" dari target yang ditetapkan "Baik" dengan prosentase capaiannya sebesar 95,75 %.

Capaian indikator sasaran masih mendapatkan kategori Baik meskipun target terealisasi masih dibawah dari target yang ditentukan yaitu 100%. Hal ini dikarenakan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat tidak bisa melaksanakan dikarenakan kurang personel yang mampu melaksanakan dan jabatan yang membidangi baru terisi pada tribulan IV sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang tersebut tidak bisa maksimal.

- ***Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik***

Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2023 terealisasi "Baik" dari target yang ditetapkan "Baik" dengan prosentase capaiannya sebesar 100%.

Capaian indikator sasaran sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan indikator desa pada Kecamatan Sawahan yang menyelesaikan administrasi desa tepat waktu mencapai 100%, sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%. Penilaian ini didasarkan pada hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kemendes dengan hasil 7 Desa kategori Maju dan 2 Desa kategori Mandiri.

3.A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2023) dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/kabupaten yang berbatasan)

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2023) dengan Standard Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi Kinerja Tahun (2023)
1	**2**	**3**	4	5
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		80,90
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	81,03	91,58
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	95,75 %
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100 %	100 %

3.A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cpaian Kinerja (%)	Tercapai/Tidak Tercapai
1	**2**	**3**	4	5
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Tercapai
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	106,5 %	Tercapai

3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	95,75 %	Tercapai
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100 %	Tercapai

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

  Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 Tercapai dengan realisasi "Sangat Baik" dari target yang ditetapkan "Baik" dengan prosentase capaiannya sebesar 106,5 %. Indikator sasaran dapat dicapai dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik) yang merupakan aplikasi untuk bisa mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara tepat dan cepat oleh seluruh penyedia pelayanan publik

- ***Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti***

  Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2023 Tercapai dengan realisasi "Baik" dari target yang ditetapkan "Baik" dengan prosentase capaiannya sebesar 95,75 %.

  Capaian indikator sasaran tercapai meskipun target terealisasi masih dibawah dari target yang ditentukan yaitu 100%. Hal ini dikarenakan kurang personel yang mampu melaksanakan dan jabatan yang membidangi baru terisi pada tribulan IV sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang tersebut tidak bisa maksimal

- ***Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik***

  Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2023 Tercapai dengan realisasi "Baik" dari target yang ditetapkan "Baik" dengan prosentase capaiannya sebesar 100%.

  Capaian indikator sasaran sudah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini tidak lepas dari pembinaan dan pengawasan kecamatn terhadap tata kelola desa .

3.A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6
Analisis Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	**2**	**3**	4	5	6
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %	77,22%	22,78%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	106,5%	76,06%	30,34%%
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	95,75%	82,26%	13,49%
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	68,78%	31,22%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 dengan prosentase capaian kinerja mencapai 106,5% dengan skor 91,58 melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 86,00. Namun dari segi realisasi anggaran dengan pagu sebesar Rp 2.537.929.550 terealisasi Rp. 1.930.263.519 atau sebesar 76,06%.

Faktor terbesar kurang maksimalnya penyerapan anggaran kegiatan dipengaruhi oleh Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) yang pada awal tahun dianggarkan dengan asumsi semua posisi terisi penuh. Namun pada kenyataannya mulai Januari hingga Agustus belum ada pengisian jabatan. Pada bulan September atau tribulan IV baru terisi.

Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran untuk Gaji dan Tunjangan hanya bisa terealisasi sebesar 74,37% hingga akhir tahun 2023.

- ***Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti***

Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan

masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2023 Tercapai dengan prosentase capaiannya sebesar 95,75 %.

Capaian Realisasi anggaran indikator sasaran sebesar 82,26% sangat dipengaruhi oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Dari pagu anggaran Rp 51.670.000 terealisasi sebesar Rp 38.548.800 atau tercapai 74,61% dan Program Penyelenggaraan Ketententraman Dan Ketertiban Umum. Dari pagu anggaran Rp 29.800.000 terealisasi sebesar Rp 20.215.000 atau tercapai 67,84%.

Hal yang berpengaruh terhadap realisasi anggaran terutama karena pejabat yang menangani urusan tidak terisi, baru di tribulan IV (bulan September) terisi. Namun dengan sisa waktu yang ada tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua kegiatan. Disamping itu Perubahan Anggaran baru bisa dilaksanakan di akhir tahun yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan terbatas waktu.

- ***Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik***

Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2023 Tercapai dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian Realisasi anggaran indikator sasaran sebesar 68,78% dipengaruhi karena kurangnya personel dan belum adanya pejabat yang membidangi sehingga pelaksanaan program kegiatan tidak maksimal. Kegiatan yang berada dalam Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari pagu anggaran sebesar Rp 59.567.500 bisa terealisasi sebesar Rp 40.970.000 atau sebesar 68,78% mayoritas dialokasikan untuk rapat dan sosialisasi dengan sasaran aparatur desa.

3.A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	**2**	**3**	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**106,4%**

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kinerja SKPD	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Produktivitas Kinerja Dan Disiplin Pegawai	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum SKPD	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang SKPD	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Sawana Dan Prasarana Barang Milik Daerah	100%
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketetiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarpras, pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan**	**83%**
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Vertikal	100%
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinsi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Terkait Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Warga Yang mendapat Pelayanan	50%

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan**	**100%**
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	100%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Dan TNI	100%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Warga/Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**100%**
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Warga/Lembaga Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsan	100%
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kegiatan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100%**
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sudah mencapai target (100%) yang ditentukan dengan diselesaikannya dokumen dan administrasi penunjang.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terlaksana sebesar 83% dari target sebesar 100%. Hal ini dikarenakan kurangnya personel khususnya yang membidangi di Kecamatan Sawahan dan Pejabat yang

membidangi baru Triwulan IV terisi posisinya, sehingga kurang optimal dalam eksekusi kegiatan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Ketententraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah terealisasi sebagaimana target tyang ditentukan (100%)

3.B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun (2023)

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Angaran	Realisasi Angaran	Sisa Angaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	**2**	**3**	4	5	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	2.537.929.550	1.930.263.519	607.666.031	76,06%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	0	100,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	200.000	200.000	0	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	200.000	200.000	0	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	200.000	200.000	0	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	200.000	200.000	0	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	200.000	200.000	0	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000	200.000	0	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.254.427.000	1.676.617.969	577.809.031	74,37%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.253.027.000	1.676.417.969	576.609.031	74,41%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	0	1.200.000	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	200.000	200.000	0	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.596.400	9.377.000	6.219.400	60,12%
	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.596.400	9.377.000	219.400	97,71%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	0	6.000.000	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.225.750	68.103.250	122.500	99,82%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.500.000	0	100,00%

	Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga	3.370.050	3.370.050	0	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.635.700	45.513.200	122.500	99,73%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000	3.500.000	0	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	0	100,00%
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.020.000	9.020.000	0	100,00%
	Penata Usahaan Arsip dinamis pada SKPD	1.200.000	1.200.000	0	100,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.350.000	26.125.000	225.000	99,15%
	Pengadaan Mebel	9.000.000	8.850.000	150.000	98,33%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.350.000	17.275.000	75.000	99,57%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.200.000	17.554.250	16.645.750	51,33%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	0	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.600.000	16.954.250	16.645.750	50,46%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.930.400	131.286.050	6.644.350	95,18%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	40.003.200	39.678.850	324.350	99,19%
	Pemeliharaan Mebel	3.502.000	3.502.000	0	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.650.000	22.650.000	0	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.775.200	65.455.200	6.320.000	91,19%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	116.735.000	107.109.450	9.625.550	91,75%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	109.805.000	101.144.450	8.660.550	92,11%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	109.805.000	101.144.450	8.660.550	92,11%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.000.000	5.000.000	0	100,00%

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.000.000	5.000.000	0	100,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1.930.000	965.000	965.000	50,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	965.000	965.000	0	100,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	965.000	0	965.000	0,00%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	51.670.000	38.548.800	13.121.200	74,61%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.670.000	38.548.800	13.121.200	74,61%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.000.000	24.488.800	10.511.200	69,97%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	16.670.000	14.060.000	2.610.000	84,34%
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	29.800.000	20.215.000	9.585.000	67,84%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.800.000	20.215.000	9.585.000	67,84%
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.800.000	20.215.000	9.585.000	67,84%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	120.067.800	114.342.800	5.725.000	95,23%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	120.067.800	114.342.800	5.725.000	95,23%

	Daerah				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120.067.800	114.342.800	5.725.000	95,23%
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	59.567.500	40.970.000	18.597.500	68,78%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.567.500	40.970.000	18.597.500	68,78%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	32.567.500	24.980.000	7.587.500	76,70%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.000.000	10.725.000	1.275.000	89,38%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.000.000	5.265.000	9.735.000	35,10%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut : Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 sebanyak 6 program dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan.

Realisasi belanja sebesar Rp. 2.251.449.569,- atau sebesar 77,22% dari pagu anggaran yaitu Rp. 2.915.769.850,- dari yang direncanakan.

Secara umum Capaian/Realisasi Program tahun 2023 belum semua memenuhi target kinerja yang diharapkan. Adapun faktor penyebab belum tercapainya target kinerja antara lain :

- Belum maksimalnya potensi sumber daya yang ada ;
- Kurangnya koordinasi yang intensif dalam proses penyelenggaraan program ;
- Kurang cermat dalam penyusunan kegiatan (waktu, anggaran dan komponen kegiatan.
- Kurangnya personel/aparatur pemerintahan di Kecamatan Sawahan

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Sawahan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Sawahan dengan mengacu pada Renstra Kecamatan SawahanTahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sawahan pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Sawahan Tahun 2023 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun sasaran strategis yang sudah dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Sawahandapatmeningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dankinerja;
b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Sawahan secara menyeluruh, efektif, dan efesien;
d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sawahan Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada tahun mendatang.

Sawahan, 16 Januari 2024

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199002 1 002

LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja tahun (n)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sawahan
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KECAMATAN SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM BAIDOWI,S.Sos

Jabatan : Camat Sawahan Kabupaten Nganjuk

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI,SE.SH.MM.M.BA

Jabatan : Bupati Nganjuk

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 5 Juni 2023

PIHAK KEDUA BUPATI NGANJUK	PIHAK PERTAMA CAMAT SAWAHAN
Dr.Drs.MARHAEN DJUMADI,SE.SH.MM.M.BA	**IMAM BAIDOWI,S.Sos** Penata Tingkat I NIP. 19690715 199202 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan	86,00
2	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Tugas Umum Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Keamanan dan Ketertiban	Prosentase Koordinasi Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Masyarakat, sarana prasarana, dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tatakelola Pemerintahan yang baik	100 %

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	2.496.071.550	APBD 2023
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	116.735.000	APBD 2023
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	51.670.000	APBD 2023
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.000.000	APBD 2023
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	120.067.800	APBD 2023
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.567.500	APBD 2023

Nganjuk, 5 Juni 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI NGANJUK

Dr.Drs.MARHAEN DJUMADI,SE.SH.MM.M.BA

PIHAK PERTAMA
CAMAT SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199202 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KECAMATAN SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKIRNO,S.Sos
Jabatan : Camat Sawahan Kabupaten Nganjuk
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI,SE.SH.MM.M.BA
Jabatan : Plt.Bupati Nganjuk
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, Januari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.BUPATI NGANJUK

Dr.Drs.MARHAEN DJUMADI,SE.SH.MM.M.BA

PIHAK PERTAMA
CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN SAWAHAN

SUKIRNO,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690807 199003 1 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan	86,00
2	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Tugas Umum Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Keamanan dan Ketertiban	Prosentase Koordinasi Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Masyarakat, sarana prasarana, dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tatakelola Pemerintahan yang baik	100 %

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	2.496.071.550	APBD 2023
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	116.735.000	APBD 2023
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	51.670.000	APBD 2023
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.000.000	APBD 2023
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	120.067.800	APBD 2023
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.567.500	APBD 2023

Nganjuk, Januari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.BUPATI NGANJUK

Dr.Drs.MARHAEN DJUMADI,SE.SH.MM.M.BA

PIHAK PERTAMA
CAMAT SAWAHAN

SUKIRNO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19690807 199003 1 010

Scanned by TapScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jl. Sedudo No. 96 Sawahan
email : kec_sawahan@yahoo.co.id
☎ (0358) 322324 Kode Pos 64475

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188 / 60 / K / 411.517 / 2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR KECAMATAN SAWAHAN

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sawahan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17
Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2015, Camat Sawahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan Sawahan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkanKeputusan Camat Sawahan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sawahan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Dipindai dengan CamScanner

Sebagaimana Telah Diubah yang dua kali terakhir Dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerentah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kenerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentangt Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangtunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngtanjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk

Nomor : 188/60/K/411.517/2021

Tanggal : 17 Februari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Kecamatan Sawahan
   Tugas : menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Fungsi :
   a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
   b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
   c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
   d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
   e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
   f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan ;
   g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
   h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ;
   i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ;
   j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Sawahan Kabupaten Nganjuk:

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN SAWAHAN

Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra
		Th.0 2018	Th 1 2019	Th.2 2020	Th.3 2021	Th.4 2022	Th.5 2023	
ilai sinergitas enyelenggaran pemerintah ecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan	2.475,8	2.477	2.479	Baik	Baik	Baik	Baik

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Nganjuk
Tahun Anggaran 2023

DPA REKAPITULASI SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.22.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Sawahan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
			PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Pendapatan	**Rp0**
			BELANJA DAERAH	
1			**BELANJA OPERASI**	**Rp2.823.761.850**
1	01		Belanja Pegawai	Rp2.262.919.000
1	02		Belanja Barang dan Jasa	Rp560.842.850
2			**BELANJA MODAL**	**Rp41.350.000**
2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp41.350.000
			Jumlah Belanja	**Rp2.865.111.850**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp2.865.111.850)**
			PEMBIAYAAN DAERAH	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
nuari	Rp0	Januari	Rp199.715.212
bruari	Rp0	Februari	Rp217.879.812
aret	Rp0	Maret	Rp402.527.224
pril	Rp0	April	Rp283.200.112
ei	Rp0	Mei	Rp123.464.912
ni	Rp0	Juni	Rp699.742.936
li	Rp0	Juli	Rp190.297.594
gustus	Rp0	Agustus	Rp195.700.112
ptember	Rp0	September	Rp181.367.812
ktober	Rp0	Oktober	Rp171.787.312
vember	Rp0	November	Rp170.408.862
sember	Rp0	Desember	Rp29.019.950
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp2.865.111.850

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023
Camat Sawahan

SUKIRNO, S Sos
NIP: 196908071990031010

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BPKAD

KARTIMAH, SE.MSi
NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jl. Sedudo No. 96 Sawahan Kode Pos 64475
☎ (0358) 322324 Faks 322324 *E-mail : sawahan@nganjukkab.go.id*

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Juni Tahun 2023 bertempat di:

1. Kecamatan : SAWAHAN
2. Kabupaten : NGANJUK
3. Provinsi : JAWA TIMUR

Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kecamatan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan desa IDM Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di sahkan Team Verifikasi

Camat Sawahan

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP 19690715 199202 1 002

Pendamping Desa

BINTI ISNANIAH

REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2023

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012001	BENDOLO	0,76	0,5667	0,8	0,7089	MAJU
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012002	SAWAHAN	0,84	0,9	0,6	0,78	MAJU
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012003	NGLIMAN	0,7486	0,7167	1	0,8217	MANDIRI
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012004	BARENG	0,8629	0,75	0,8	0,8043	MAJU
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012005	SIDOREJO	0,8571	0,6667	0,6667	0,7302	MAJU
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012006	DUREN	0,8171	0,7	0,9333	0,8168	MANDIRI
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012007	SIWALAN	0,7771	0,7833	0,8667	0,809	MAJU
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012008	MARGOPATUT	0,8343	0,7167	0,6667	0,7392	MAJU
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	351801	SAWAHAN	3518012009	KEBONAGUNG	0,7886	0,6667	0,8	0,7517	MAJU

Di sahkan Team Verifikasi

Camat Sawahan

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

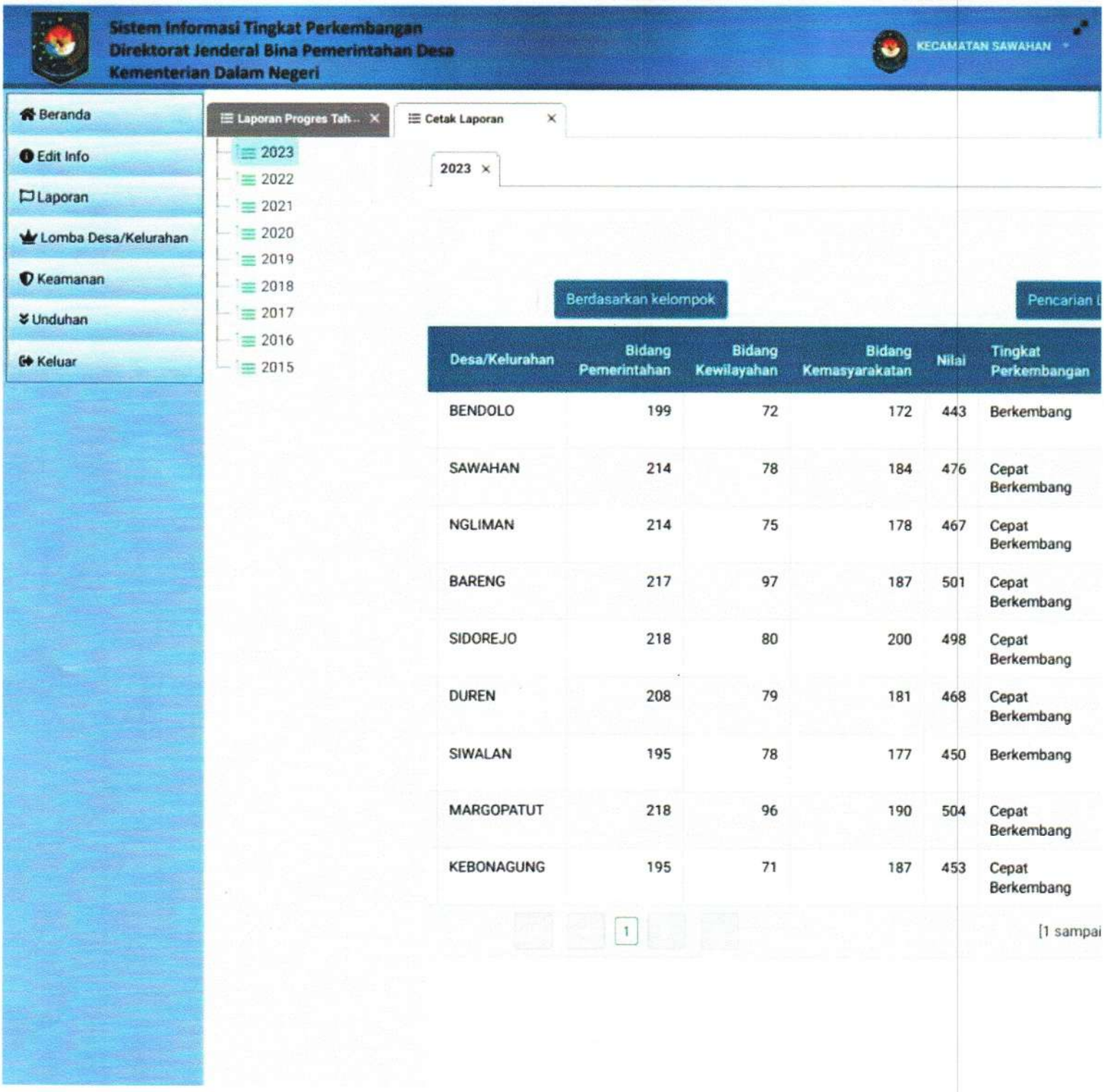
IMAM BAIDOWI, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19690715 199202 1 002

Pendamping Desa

BINTI ISNANIAH



CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
NIP. 19690715 199202 1 002

2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	BENDOLO	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	SAWAHAN	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	NGLIMAN	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	BARENG	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	SIDOREJO	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	DUREN	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	SIWALAN	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	MARGOPATUT	0	1	1	0	100,00 %	
2023	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	SAWAHAN	KEBONAGUNG	0	1	1	0	100,00 %	

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
NIP. 19690715 199202 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmad No.1 Nganjuk Telp.No. (0358) 323388
Email : www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 07 November 2023

Nomor	:	100/3242/411.000/2023	Kepada
Sifat	:	Segera	Yth. Sdr. Camat Se-Kabupaten Nganjuk
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Perihal	:	Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas Kecamatan Tahun 2023	di N G A N J U K

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Hasil Penilaian Administrasi dan Tinjau Lapang Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2023 pada tanggal 17 Oktober 2023, maka bersama ini kami sampaikan hal sebagaimana berikut :

A. Dasar

1. Ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/313/K/411.013/2023 tentang Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.2.2/35289/011.1/2023 tanggal 15 September 2023 hal Sinergitas Kinerja Kecamatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

B. Ruang Lingkup

1. Penilaian Administrasi berdasarkan upload data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023.
2. Penilaian Indikator Manajerial berdasarkan kuisioner yang dibagikan kepada ASN di Kecamatan masing-masing dengan ketentuan nilai rata-rata dari hasil kuisioner.

C. Hasil Penilaian

1. Sampai dengan pelaksanaan rapat pleno pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023 masih ada indikator yang belum disetujui dikarenakan :
    a. Format data dukung belum sesuai;
    b. Data dukung belum sesuai dengan isian indikator yang dimasukan; dan
    c. Data dukung belum dilengkapi dengan narasi yang jelas tempat dan tanggal dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Hasil Penilaian Administrasi dan Indikator Manajerial sebagaimana berikut :

NO	KECAMATAN	SINCAN	INDIKATOR MANAJERIAL	RATA-RATA	RANKING
1	NGANJUK	84,82	89,25	87,03	1
2	BAGOR	85,33	88,00	86,66	2
3	PRAMBON	85,35	86,75	86,05	3
4	BERBEK	86,56	85,00	85,78	4
5	WILANGAN	79,85	89,50	84,68	5
6	NGETOS	93,70	75,50	84,60	6
7	SUKOMORO	87,24	81,75	84,49	7
8	TANJUNGANOM	87,46	79,25	83,36	8
9	KERTOSONO	70,62	95,00	82,81	9
10	NGLUYU	81,74	83,50	82,62	10
11	LENGKONG	84,69	80,00	82,35	11
12	SAWAHAN	85,30	76,50	80,90	12
13	REJOSO	74,71	86,75	80,73	13
14	NGRONGGOT	76,19	85,25	80,72	14
15	PACE	85,06	76,25	80,65	15
16	PATIANROWO	80,84	79,75	80,29	16
17	BARON	78,50	80,25	79,37	17
18	LOCERET	84,69	73,50	79,10	18
19	GONDANG	73,74	78,50	76,12	19
20	JATIKALEN	72,10	76,75	74,42	20

C. Rekomendasi

1. Hasil Evaluasi Penilaian Administrasi sebagaimana huruf C angka 1 diatas berupa catatan dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) harus ditindaklanjuti oleh Camat paling lambat sebelum Tahun Anggaran 2023 berakhir.
2. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi data dukung kinerja yang berkualitas diharapkan kepada Saudara Camat supaya memerintahkan kepada Pejabat di Lingkungan masing masing agar :
   a. Setiap Pejabat atau yang ditugasi agar memahami tugas, pokok dan fungsi;
   b. Memetakan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan;
   c. Tugas pokok dan fungsi yang belum dilaksanakan agar direncanakan langkah tindak lanjut; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat agar diiput pada isian Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) dan dilengkapi data dukung.

3. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaporkan perbulan oleh penyusun per Tri Wulan (3 bulan) dan di verifikasi oleh Kepala Seksi maupun Kepala Sub Bagian serta dilaporkan oleh Sekretaris Camat dan Camat per semester (6 bulan).
4. Untuk pengisian hasil kinerja Tahun 2023 dapat dilakukan input data pada Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) mulai Januari 2024, diharapkan agar Pejabat atau yang ditugasi mulai saat ini setiap hasil kinerja harus discan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Pj. Bupati Nganjuk (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Inspektur Daerah Kab. Nganjuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LKjIP

KECAMATAN SAWAHAN

-- TAHUN 2023 --

DOKUMEN

RAPAT INTERNAL TRIBULAN TAHUN 2023

KECAMATAN SAWAHAN

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jalan Sedudo No. 96 Telp./Fax. [0358] 322324
Email :kec-sawahan@nganjukkab.co.id
S A W A H A N
Kode Pos 64475

NOTA DINAS

Kepada	:	Seluruh PPTK Kecamatan Sawahan
Dari	:	Camat Sawahan
Tanggal	:	27 Maret 2023
Nomor	:	005/ 131 /411.517/2023
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	-
Perihal	:	Undangan

Mengharap kehadiran Saudara besok pada :

Hari	: Senin
Tanggal	: 27 Maret 2023
Pukul	: 08.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor Kecamatan Sawahan
Acara	: Rapat PPTK Kecamatan Sawahan

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

SUKIRNO,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690807 199003 1 010

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

Perangkat Daerah : Kecamatan Sawahan
Hari/Tanggal : Senin 27 Maret 2023

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sukirno,S.Sos	19690807 199003 1 010	Camat	
2	Slamet,SE	19650506 198903 1 026	Sekretaris Kecamatan	
3	ANI PURWANDARI,S.Sos	19690805 199202 2 002	Bendahara	
4	SU'UT MASRUL KHOSIAH,S.Sos	19800317 200501 2 012	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
5	Bambang Eddy Joko W.	19820331 200901 1006	Pengadministrasi Pemerintahan	
6	Wisnu Murti P.	19820405 200901 1 012	Pengadministrasi Pemerintahan	
7	Parsuli	19710626 200801 1 003	Pengadministrasi Sarpras	

CAMAT SAWAHAN

KECAMATAN SAWAHAN

SUKIRNO,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19690807 199003 1 010

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jl. Sedudo No. 96 Sawahan Kode Pos 64475
Telp (0358) 322324 Faks. 322324 e-mail : sawahan@nganjukkab.go.id

NOTULEN

Nama Rapat	:	Rapat PPTK
Hari, tanggal	:	Senin 27 Maret 2023
Waktu	:	08.00 – 09.00 WIB
Tempat	:	Pendopo Kecamatan Sawahan
Acara	:	Rapat PPTK
Dihadiri oleh:	:	1.Camat Sawahan 2.Kasubag Umum 3.PPTK
Pemimpin Rapat	:	Camat Sawahan
Hasil Rapat	:	Petunjuk dan arahan dari bapak Camat :

1. Evaluasi penyerapan anggaran Tribulan I kegiatan kegiatan yang belum maksimal dilaksanakan untuk triwulan II segera direncanakan dan dilaksanakan karena akan berpengaruh pada penilaian kinerja pada OPD dan berpengaruh pada perolehan TPP ASN Kecamatan Sawahan
2. Untuk Triwulan II agar setiap PPTK segera melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dalam Renja
3. Agar semua ASN Kecamatan Sawahan meningkatkan disiplin kinerjanya

Pembuat notula
Kasubag Umum dan Kepegawaian

SU'UT MASRUL KHOSIAH,S.Sos
Penata Muda Tk I
NIP.19800317 200501 2 012

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jalan Seludo No. 96 Telp./Fax. [0358] 322324
Email :kec-sawahan@nganjukkab.co.id
S A W A H A N
Kode Pos 64475

NOTA DINAS

Kepada	:	Sekcam, Kasi/Kasubag dan PPTK
Dari	:	Camat Sawahan
Tanggal	:	26 Juni 2023
Nomor	:	005/ 286/411.517/2023
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	-
Perihal	:	Undangan

Mengharap kehadiran Saudara besok pada :

Hari	: Senin
Tanggal	: 26 Juni 2023
Pukul	: 08.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor Kecamatan Sawahan
Acara	: Rapat PPTK Kecamatan Sawahan

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690715 199202 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

Perangkat Daerah : Kecamatan Sawahan
Hari/Tanggal :

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Imam Baidowi,S.Sos	19690715 100202 1 002	Camat	
3	ANI PURWANDARI,S.Sos	19690805 199202 2 002	Bendahara	
4	SU'UT MASRUL KHOSIAH,S.Sos	19800317 200501 2 012	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
5	Bambang Eddy Joko W.	19820331 200901 1006	Pengadministrasi Pemerintahan	
6	Wisnu Murti P.	19820405 200901 1 012	Pengadministrasi Pemerintahan	
7	Parsuli	19710626 200801 1 003	Pengadministrasi Sarpras	

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19690715 100202 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jl. Sedudo No. 96 Sawahan Kode Pos 64475
Telp (0358) 322324 Faks. 322324 e-mail : sawahan@nganjukkab.go.id

NOTULEN

Nama Rapat	:	Rapat PPTK
Hari, tanggal	:	Senin, 26 Juni 2023
Waktu	:	08.00 – 09.00 WIB
Tempat	:	Pendopo Kecamatan Sawahan
Acara	:	Rapat PPTK
Dihadiri oleh:	:	1.Camat Sawahan 2.Kasubag Umum 3.PPTK
Pemimpin Rapat	:	Camat Sawahan
Hasil Rapat	:	Petunjuk dan arahan dari bapak Camat :

1. Evaluasi penyerapan anggaran Tribulan II kegiatan kegiatan yang belum maksimal dilaksanakan untuk triwulan III segera direncanakan dan dilaksanakan karena akan berpengaruh pada penilaian kinerja pada OPD dan berpengaruh pada perolehan TPP ASN Kecamatan Sawahan
2. Untuk Triwulan III agar setiap PPTK segera melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dalam Renja

Pembuat notula
Kasubag Umum dan Kepegawaian

SU'UT MASRUL KHOSIAH,S.Sos
Penata Muda Tk I
NIP.19800317 200501 2 012

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jalan Sedudo No. 96 Telp./Fax. [0358] 322324
Email :kec-sawahan@nganjukkab.co.id
S A W A H A N
Kode Pos 64475

NOTA DINAS

Kepada	:	Seluruh PPTK Kecamatan Sawahan
Dari	:	Camat Sawahan
Tanggal	:	21 September 2023
Nomor	:	005/421/411.517/2023
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	-
Perihal	:	Undangan

Mengharap kehadiran Saudara besok pada :

Hari	: Kamis
Tanggal	: 21 September 2023
Pukul	: 08.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor Kecamatan Sawahan
Acara	: Rapat PPTK Kecamatan Sawahan

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199202 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

Perangkat Daerah : Kecamatan Sawahan
Hari/Tanggal :

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IMAM BAIDOWI,S.Sos	19690715 199202 1 002	Camat	
2	SUWARDI,S.Sos	19690715 199202 1 002	Sekretaris Kecamatan	
3	ANI PURWANDARI,S.Sos	19690805 199202 1 002	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
4	BAMBANG MINTARGO,S.Sos	19751119 199802 1 005	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
5	LULUK NOVITA R.P,S.STP	19910603 201507 2 001	Kasi Pemerintahan san Pelayanan Publik	
6	ALI SISWANTO,S.Sos	19800217 200501 1 009	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
7	SU'UT MASRUL K,S.Sos	19800317 200501 2 012	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP 19690715 100202 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jl. Sedudo No. 96 Sawahan Kode Pos 64475
Telp (0358) 322324 Faks. 322324 e-mail : sawahan@nganjukkab.go.id

NOTULEN

Nama Rapat	:	Rapat PPTK
Hari, tanggal	:	Kamis, 21 September 2023
Waktu	:	08.00 – 09.00 WIB
Tempat	:	Pendopo Kecamatan Sawahan
Acara	:	Rapat PPTK
Dihadiri oleh:	:	1.Camat Sawahan 2.Kasubag Umum 3.PPTK
Pemimpin Rapat	:	Camat Sawahan
Hasil Rapat	:	Petunjuk dan arahan dari bapak Camat :

1. Evaluasi penyerapan anggaran Tribulan III kegiatan kegiatan yang belum maksimal dilaksanakan untuk triwulan III segera direncanakan dan dilaksanakan karena akan berpengaruh pada penilaian kinerja pada OPD dan berpengaruh pada perolehan TPP ASN Kecamatan Sawahan
2. Untuk Triwulan IV agar setiap PPTK segera melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dalam Renja

Pembuat notula
Kasubag Umum dan Kepegawaian

SU'UT MASRUL KHOSIAH,S.Sos
Penata Muda Tk I
NIP.19800317 200501 2 012

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jalan Sedudo No. 96 Telp./Fax. [0358] 322324
Email :kec-sawahan@nganjukkab.co.id
S A W A H A N
Kode Pos 64475

NOTA DINAS

Kepada	:	Sekcam, Kasi/Kasubag dan PPTK
Dari	:	Camat Sawahan
Tanggal	:	19 Desember 2023
Nomor	:	005/7[illegible]/411.517/2023
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	-
Perihal	:	Undangan

Mengharap kehadiran Saudara besok pada :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 19 Desember 2023
Pukul	: 08.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor Kecamatan Sawahan
Acara	: Rapat PPTK Kecamatan Sawahan

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199202 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

Perangkat Daerah : Kecamatan Sawahan
Hari/Tanggal :

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IMAM BAIDOWI,S.Sos	19690715 199202 1 002	Camat	
2	SUWARDI,S.Sos	19690715 199202 1 002	Sekretaris Kecamatan	
3	ANI PURWANDARI,S.Sos	19690805 199202 1 002	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
4	BAMBANG MINTARGO,S.Sos	19751119 199802 1 005	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
5	LULUK NOVITA R.P,S.STP	19910603 201507 2 001	Kasi Pemerintahan san Pelayanan Publik	
6	ALI SISWANTO,S.Sos	19800217 200501 1 009	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
7	SU'UT MASRUL K,S.Sos	19800317 200501 2 012	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19690715 100202 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

Perangkat Daerah : Kecamatan Sawahan
Hari/Tanggal :

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IMAM BAIDOWI,S.Sos	19690715 199202 1 002	Camat	
2	SUWARDI,S.Sos	19690715 199202 1 002	Sekretaris Kecamatan	
3	ANI PURWANDARI,S.Sos	19690805 199202 1 002	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
4	BAMBANG MINTARGO,S.Sos	19751119 199802 1 005	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
5	LULUK NOVITA R.P,S.STP	19910603 201507 2 001	Kasi Pemerintahan san Pelayanan Publik	
6	ALI SISWANTO,S.Sos	19800217 200501 1 009	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
7	SU'UT MASRUL K,S.Sos	19800317 200501 2 012	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19690715 100202 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jl. Sedudo No. 96 Sawahan Kode Pos 64475
Telp (0358) 322324 Faks. 322324 e-mail : sawahan@nganjukkab.go.id

NOTULEN

Nama Rapat	:	Rapat PPTK
Hari, tanggal	:	Selasa 19 Desember 2023
Waktu	:	08.00 – 09.00 WIB
Tempat	:	Pendopo Kecamatan Sawahan
Acara	:	Rapat PPTK
Dihadiri oleh:	:	1.Camat Sawahan 2.Kasubag Umum 3.PPTK
Pemimpin Rapat	:	Camat Sawahan
Hasil Rapat	:	Petunjuk dan arahan dari bapak Camat :

1. Evaluasi penyerapan anggaran Tribulan IV kegiatan-kegiatan yang telah maksimal dilaksanakan dan persipan untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan penyusunan LKJIP dan LKPD

Pembuat notula
Kasubag Umum dan Kepegawaian

SU'UT MASRUL KHOSIAH,S.Sos
Penata Muda Tk I
NIP.19800317 200501 2 012

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KECAMATAN SAWAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Keg/Sub Kegiatan	Bulan												Keterangan/PPTK
		Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Sosialisasi PBB													PUJIANTO
2	Rapat Intensifikasi Pemasukan PBB													LULUK NOVITA,S.STP
3	Rapat Evaluasi Pemasukan PBB													LULUK NOVITA,S.STP
4	Pembinaan FKUB													LULUK NOVITA,S.STP
5	Semaan Al-Quran													PUJIANTO
6	Safari Romadhon													PUJIANTO
7	Forum Kecamatan Sehat													PUJIANTO
8	Pembinaan UKS													PUJIANTO
9	Rapat koordinasi pemeliharaan sarpras pelayanan umum													LULUK NOVITA,S.STP
10	Sosialisasi IKD													PUJIANTO
11	Koordinasi pelimpahan kewenangan													LULUK NOVITA,S.STP
12	Pengadaan Mebel													SU'UT M
13	Belanja Modal Alat rumah TanggaLainya (Home Use)													SU'UT M
14	Belanja Modal Personal Komputer													SU'UT M
15	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer													SU'UT M
16	Pendidikan dan pelatihan pegawai													SU'UT M
17	Belanja Komponen Instalasi Listrik													SU'UT M
18	Belanja Peralatan Rumah Tangga/Perabot Kantor													SU'UT M
19	Belanja ATK													SU'UT M
20	Belanja bahan komputer (Catrid)													SU'UT M
21	Lembur input simaset													SU'UT M
22	Penggandaan													SU'UT M
23	Belanja langganan surat kabar													SU'UT M
24	Perjalanan dinas dalam daerah													SU'UT M
25	Penata Usahaan Arsip													SU'UT M
26	Belanja bahan untuk kegiatan kantor-benda pos													SU'UT M
27	Pemeliharaan kendaraan													SU'UT M
28	Pemeliharaan mebel													SU'UT M
29	Belanja alat/bahan kegiatan kantor-bahan komputer													SU'UT M
30	Pemeliharaan gedung kantor													SU'UT M
31	Musrenbang Kecamatan													WISNU MURTI PAMUNGKAS
32	BUMDES													WISNU MURTI PAMUNGKAS
33	UMKM													WISNU MURTI PAMUNGKAS
34	Koordinasi Stunting													WISNU MURTI PAMUNGKAS
35	Pertemuan Rutin Pleno PKK													WISNU MURTI PAMUNGKAS
36	Penyuluhan Perkoperasian (KOPWAN)													WISNU MURTI PAMUNGKAS
37	Penyuluhan PTP dan Pengolahan Hasil													WISNU MURTI PAMUNGKAS
38	Fasilitasi perencanaan desa													ANI PURWANDARI
39	rapat fasilitasi epdeskel													ANI PURWANDARI

Dipindai dengan CamScanner

40	rapat sistem informasi desa/profil desa													ANI PURWANDARI
41	Pembinaan keamanan dan ketertiban													ANI PURWANDARI
42	Fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa													ANI PURWANDARI
43	Fasilitasi APBdes, P.APBdes													ANI PURWANDARI
44	Fasilitasi pelaksanaan tugas BPD													ANI PURWANDARI
45	Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa													ANI PURWANDARI
46	Rakor kamituwo													ANI PURWANDARI
47	Rakor Kasi/Kaur													ANI PURWANDARI
48	Rakor kades													ANI PURWANDARI
49	Rakor Sekdes													ANI PURWANDARI
50	Sinergitas dengan POLRI dan TNI dan Instansi Vertikal													DAMIANTO,S.Sos
51	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan													DAMIANTO,S.Sos
52	Pembinaan Wawasan kebangsaan													DAMIANTO,S.Sos
53	Resepsi Kenegaraan													DAMIANTO,S.Sos
54	Kegiatan HUT RI													DAMIANTO,S.Sos
55	Perabot Kantor													DAMIANTO,S.Sos
56	HUT Nganjuk													DAMIANTO,S.Sos
57	Paskibra													DAMIANTO,S.Sos

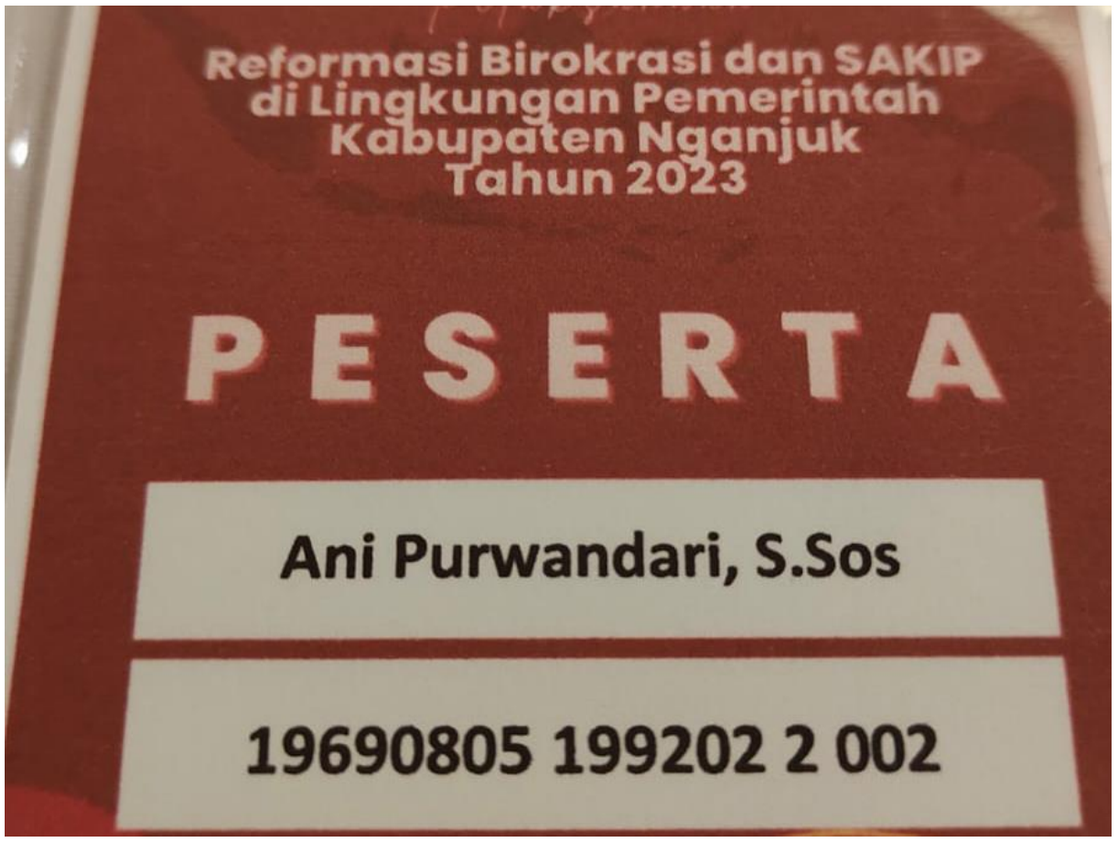
Dipindai dengan CamScanner

Keikutsertaan Bimtek, Sosialisasi di Perangkat Daerah terkait SAKIP






#NGANJUK BANGKIT BerAKHLAK
Bimbingan Teknis
PELAKSANAAN REFORMA
DAN SISTEM
INSTANSI
#bangga melayani bangsa


Reformasi Birokrasi dan SAKIP
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023
PESERTA
Ani Purwandari, S.Sos
19690805 199202 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rakhmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 321746 Faks (0358) 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 22 Februari 2023

Nomor : 005/511/411.000/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Kepada
Yth. 1. Inspektur Daerah Kab. Nganjuk;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Staf Ahli Bupati;
4. Sekretaris DPRD Kab. Nganjuk;
5. Kepala Badan/Dinas Kab. Nganjuk;
6. Camat se-Kabupaten Nganjuk.

di-
NGANJUK

Dalam rangka peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis RB dan SAKIP bagi seluruh Perangkat Darerah di Kabupaten Nganjuk dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB).

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara untuk hadir bersama Sekretaris dan Kepala Subbag Program Evaluasi/Jabatan Fungsional Perencana, besok pada :

Hari : Jumat s.d Sabtu
Tanggal : 3 s.d 4 Maret 2023
Waktu : sebagaimana jadwal terlampir
Tempat : Hotel The Royal Surakarta Heritage, Jl. Slamet Riyadi No.6, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Catatan :
1. Biaya akomodasi dan perjalanan dinas di bebankan pada Perangkat Daerah masing-masing;
2. Peserta yang ikut bimtek (hanya yang sudah mendaftar dan mendapatkan nomor peserta dari pantia);
3. Konfirmasi kehadiran dan pendaftaran perserta Bimtek paling lambat ***27 Februari 2023*** (CP : sdri. Siti Uswatun Hasanah, S.STP Nomor. HP 085232674333).

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

Tembusan :
Yth. Plt. Bupati Nganjuk (sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
Tanggal : 22 Februari 2023
Nomor : 005/511/411.000/2023

RENCANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN SAKIP
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023.

No	Hari / Tanggal	Pukul	Acara	Penanggungjawab
1	Jum;at, 3 Maret 2023	12.30-13.00	Registrasi peserta	Panitia
		13.00-13.15	Laporan Panitia	Sekretaris Daerah
		13.15-13.30	Sambutan	Bapak Bupati
		13.30-13.45	Coffee break	Panitia
		13.45-17.15	Materi 1 : ”upaya peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi”	Narasumber : Novan Kharisma S.S.lan (Kementerian PAN RB)
		19.00-19.15	Coffee break	Panitia
		19.15-22.00	Materi 2 : ”tematik reformasi birokrasi”	Narasumber : Budi Prawira, SE., MM. (Kementerian PAN RB)
2	Sabtu, 4 Maret 2023	08.00-08.15	Coffee break	Panitia
		08.15-11.15	Materi 1 : Penguatan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”	Narasumber : Budi Prawira, SE., MM. (Kementerian PAN RB)
		11.15-12.45	Materi 2 : ”Penguatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”	Narasumber (Kementerian PAN RB)
		12.45-selesai	Penutupan	Panitia

** rundown acara sewaktu-waktu bisa berubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 1 Maret 2023

Nomor : 893/608/411.000/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Peserta Bimtek Pelaksanaan RB Dan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Kepada
Yth. 1. Inspektur Daerah Kab. Nganjuk
2. Asisten Sekda Kab. Nganjuk
3. Staff Ahli Bupati
4. Sekretaris DPRD Kab.Nganjuk
5. Kepala Dinas/ Badan Kab.Nganjuk
6. Camat se Kab. Nganjuk
di -
NGANJUK

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Tanggal 22 Februari 2023, Nomnor: 005/511/411.000/2023, Hal: Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP, berikut kami lampirkan daftar peserta bimtek pada:

Hari : Jumat s.d. Sabtu

Tanggal : 3 s.d. 4 Maret 2023

Tempat : Hotel The Royal Surakarta Heritage, Jl. Slamet Riyadi No.6, Kp Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah

Catatan :
1. Peserta membawa dokumen Renstra Perangkat Daerah (review), Renstra 2024 – 2026, Renja 2022-2023, DPA 2022-2023, PK Tahun 2022-2023, serta LKjIP Tahun 2021-2022 (dalam bentuk softcopy).
2. Data Peserta Bimtek yang belum sesuai dapat dilakukan perbaikan melalui *link* berikut ***https://bit.ly/perbaikandatabimtek***

Demikian untuk diikuti dan dilaksankan dengan sebaik-baiknya.

SEKRETARIS DAERAH

Drs. NUR SOLEKAN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198902 1 00

Tembusan:
Yth. Bupati Nganjuk (sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran :
Nomor : 893/608/411.000/2023
Tanggal : 1 Maret 2023

DAFTAR PESERTA
BIMTEK PELAKSANAAN RB DAN SAKIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	NIP	Jabatan	PERANGKAT DAERAH
1	Drs. Nur Solekan, M.Si.	Pembina Utama Muda (IV/c)	19661227 198602 1 001	Sekretaris Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
2	Dra. Rr. Heni Rochtanti, MM.	Pembina Utama Muda (IV/c)	19630919 199003 2 006	Asisten Administrasi Umum Sekda	SEKRETARIAT DAERAH
3	Judi Ernanto, S.Pi., MM	Pembina Utama Muda (IV/c)	19690423 199503 1 002	Asisten Perekonomian Dan Pembangungan Sekda	SEKRETARIAT DAERAH
4	Drs. Sarwo Widodo	Pembina Tk.I (IV/b)	19710707 199201 1 004	Kabag Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH
5	Samsul Huda			Asisten Pemerintahamn dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
6	Mudilatul Lailil, SH., MM.	Pembina Tk.I (IV/b)	19661229 199203 2 004	Kabag Kesra Setda Kab Nganjuk	SEKRETARIAT DAERAH
7	Sutrisno, SH., M.Si	Pembina (IV/a)	19680501 199202 1 001	Kabag Hukum	SEKRETARIAT DAERAH
8	Drs. Sugeng Harianto, MM	Pembina Tk.I (IV/b)	19670101 199302 1 001	Kabag Perekonomian Setda Kab.Nganjuk	SEKRETARIAT DAERAH
9	Harjito, S.T., M.Si	Pembina Tk.I (IV/b)	19691017 199703 1 007	Kabag Administrasi Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH
10	Hany Adi Nugroho, S.T	Penata Tk.I (III/d)	19750505 200312 1 015	Kabag Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kab Nganjuk	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

11	Muji Subagya, S.T	Pembina Tk.I (IV/b)	19680501 199703 1 007	Kabag Sumber Daya Alam Setda Kab Nganjuk	SEKRETARIAT DAERAH
12	Drs. Nugroho	Pembina Tk.I (IV/b)	19731020 199302 1 001	Kabag Perencanaan & Keuangan	SEKRETARIAT DAERAH
13	Indria Aksiomaningtiwi, S.AB	Penata Tk.I (III/d)	198703080 201001 2 026	Perencana Ahli Muda	SEKRETARIAT DAERAH
14	Dra. Asti Widyartini, M.Si	Pembina Tk.I (IV/b)	19670315 199403 2 007	Staf Ahli Bidang SDM dan Kesra	SEKRETARIAT DAERAH
15	Drs. Eko Sutrisno, MM	Pembina Tk.I (IV/b)	19680311 198903 1 009	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik	SEKRETARIAT DAERAH
16	Yusi Diah Agussasi, S.Sos	Penata Muda (III/a)	19820831 201001 2 003	Bendahara	SEKRETARIAT DAERAH
17	Ari Samudro Pribadi, S.Tr.IP	Penata Muda (III/a)	19980923 202208 1 001	Ajudan	SEKRETARIAT DAERAH
18	Samsuri	Pengatur TK.I (II/d)	19790301 200901 1 004	Pengemudi	SEKRETARIAT DAERAH
19	Fredian Dwi Priyanarka, S.STP., M.AP	Penata (III/c)	19900319 201406 1 001	Perencana Ahli Muda	SETWAN
20	Alfian Junaidi	Pengatur TK.I (II/d)	19750907 200901 1 003	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	SETWAN
21	Drs. Mokhamad Yasin, M.Si	Pembina Utama Madya (IV/d)	19661005 198703 1 010	Inspektur	INSPEKTORAT
22	Okky Hayu Pamuja, S.STP, M.Si	Penata (III/c)	19901016 201206 1 003	Plt. Sekretaris	INSPEKTORAT
23	Zam Permatasari, S.Ak	Penata Muda (III/a)	19970829 202012 2 004	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	INSPEKTORAT
24	Drs. M. Miftaqul Mujib, MM	Pembina Tk. I (IV/b)	19670315 199203 1 010	Inspektur Pembantu II	INSPEKTORAT
25	Anang Triyanto, SH, M.Si	Pembina (IV/a)	19660710 1991202 1 001	Inspektur Pembantu IV	INSPEKTORAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

26	Sudarmono, AP, MM	Pembina Tingkat I (IV/b)	19760213 199412 1 001	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigasi, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB	INSPEKTORAT
27	Rizky Rusmawati, S.STP, M.Si	Penata Tk.I (III/d)	19850110 200312 2 002	Auditor Muda	INSPEKTORAT
28	Intan Esy Nurwaya, ST	Penata Tk.I (III/d)	19800327 200903 2 004	Auditor Muda	INSPEKTORAT
29	Nurima Jiwayanti, SH	Penata (III/c)	19870910 201001 2 018	Auditor Muda	INSPEKTORAT
30	Didik Hendra Kurniawan, SE	Penata Muda Tk.I (III/b)	19870803 201001 1 008	Auditor Pelaksanaan Lanjutan	INSPEKTORAT
31	Heni Purwanti, SE, CGAA	Penata Muda (III/a)	19841102 201903 2 011	Auditor Pertama	INSPEKTORAT
32	Dr. Sopingi, A.P., M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	19740302 199311 1 001	Kepala Dinas Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
33	Hadi Sukamto, S.Pd., M.Si	Pembina (IV/a)	19660517 198603 1 005	Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
34	Prima Artika Pratiwi, S.IP., M.Si	Penata Tk.I (III/d)	19860326 201001 2 001	Perencana Ahli Muda	DINAS PENDIDIKAN
35	Fetria Bayu Setiawan				DINAS PENDIDIKAN
36	Dra. Sri Handariningasih, MM	Pembina Tk.I (IV/b)	19680110 199412 2 002	Kepala Dinas Porabudpar	DINAS PORABUDPAR
37	Itsna Shofiani., ST., MT	Pembina (IV/a)	19790404 200312 2 006	Sekretaris Dinas Porabudpar	DINAS PORABUDPAR
38	Rr. Erny Kartika Indryastuti, ST	Penata Tk.I (III/d)	19710404 199503 2 002	Perencana Ahli Muda	DINAS PORABUDPAR
39	I Ketut Wijayadi, S.ST	Penata Tk.I (III/d)	19690508 199203 1 011	Kepala Bidang P2P	DINAS KESEHATAN
40	dr. Laksomono Pratignjo	Pembina (IV/a)	19651015 200701 1 018	Sekretaris Dinas kesehatan	DINAS KESEHATAN
41	Andriyana Maharani, S.KM., M.Kes	Pembina (IV/a)	19810314 200501 2 017	Perencana Ahli Muda	DINAS KESEHATAN
42	Yudi Suryanto, S.KM	Penata Tk.I (III/d)	19690729 199303 1 003	Kabid Sumber Daya Kesehatan	DINAS KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

43	Chandra Karuniawan, S.Km	Penata (III/c)	19781129 200501 1 008	Pengevaluasi Program dan Kinerja	DINAS KESEHATAN
44	drg. ME. Isdinar	Penata Tk.I (III/d)	19670820 199312 2 003	Kabid Yankes	DINAS KESEHATAN
45	Lilik Ernawati, S.KM	Penata Tk.I (III/d)	19681101 199303 2 010	Perencana Ahli Muda RSD Nganjuk	DINAS KESEHATAN
46	Wahyu Herwati Cahyo	Penata (III/c)	19841125 201001 2 022	Kasubbag Perencanaan RSD Kertosono	DINAS KESEHATAN
47	Dra. Sri Soebekti, MM	Pembina Tk.I (IV/b)	19670930 199403 2 008	Sekretaris Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL PPPA
48	Ida Hastutik, SE	Penata Tk.I (III/d)	19801025 200903 2 003	Analis Keuangan Pusat Dan Daerah	DINAS SOSIAL PPPA
49	M. Sofyan Hadi P, S.Or				DINAS SOSIAL PPPA
50	Dra. Widyasti Sidhartini, M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	19650612 199003 2 010	Kepala Dinas PPKB	DINAS PPKB
51	Anang Agus Susilo, S.Kep.Ns., M.Kes	Pembina (IV/a)	19760804 199703 1 004	Sekretaris Dinas PPKB	DINAS PPKB
52	Endang Setianik, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	19760804 199703 1 004	Perencana Ahli Muda	DINAS PPKB
53	Haniek Retno Widayanti, SE., M.Si	Pembina (IV/a)	19790417 200312 2 010	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	DINAS PPKB
54	Sri Supiani, A.Md., S.Sos	Penata Muda (III/a)	19800510 201001 2 026	Pengelola Kepegawaian	DINAS PPKB
55	Syifa Machasin Durra	-	-	-	DINAS PPKB
56	Drs. Gatut Sugiarto, M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	19690508 198903 1 002	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	DISPENDUKCAPIL
57	Rini Sih Purwanti, SE	Penata Tk.I (III/d)	19720909 199703 2 004	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dispenduk Capil	DISPENDUKCAPIL
58	Sigit Priyo Budianto, ST	Penata (III/c)	19760510 201101 1 003	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	DISPENDUKCAPIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

59	Puguh Harnoto, S.STP., MM	Pembina Tk.I (IV/b)	19750708 199602 1 001	Kepala Dinas PMD	DINAS PMD
60	Teguh Ovi Andriyanto, S.IP	Pembina (IV/a)	19730906 199303 1 006	Sekretaris Dinas PMD	DINAS PMD
61	Lasmijah, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	19720216 199703 2 004	Perencana Ahli Muda	DINAS PMD
62	Purwo Bujono, S.Hut	Pembina (IV/a)	19670912 199703 1 004	Kepala Dinas PMPTSP	DINAS PM & PTSP
63	Deddy Tri Laksana, S.sos	Penata Tk.I (III/d)	19720416 199403 1 010	Perencana Ahli Muda	DINAS PM & PTSP
64	Nanuk Setyowati, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	19671011 199302 2 009	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	DINAS PM & PTSP
65	Haris Jatmiko, S.Pd., M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	19711219 199803 1 006	Kepala Dinas Perindag	DISPERINDAG
66	Dra. Iit Herlyana, MM	Pembina Tk.I (IV/b)	19661025 198803 2 004	Sekretaris Dinas Perindag	DISPERINDAG
67	Yuliasih, S.Sos, M.Si	Penata (III/c)	19800222 201101 2 005	Perencana Ahli Muda	DISPERINDAG
68	Cuk Widiyanto, SH., MM	Pembina Tk.I (IV/b)	19660507 199203 1 013	Kepala Dinas Koperasi Dan UM	DINAS KOP & UM
69	Drs. Sri Laksmita Hardini	Pembina Tk.I (IV/b)	19660712 199202 2 002	Sekretaris Dinas Koperasi Dan UM	DINAS KOP & UM
70	Guntoro, S.Pd	Penata Tk.I (III/d)	19790331 201001 1 002	Perencana Ahli Muda	DINAS KOP & UM
71	Drs. Supiyanto, MM	Pembina Utama Muda (IV/c)	19631015 198903 1 016	Kepala Dinas Tanaga Kerja	DISNAKER
72	Drs. Nur Wisnu Banrawan, MM	Pembina Tk.I (IV/b)	19651111 199603 1 011	Sekretaris Dinas Tanaga Kerja	DISNAKER
73	Sri Utami, S.Sos	Penata (III/c)	19730424 199503 2 003	Perencana Ahli Muda	DISNAKER
74	Ujiana Wahyuni, S.S	Penata (III/c)	19860709 201101 2 007	Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	DISNAKER
75	Putri Agus Setyo Pratiwi				DISNAKER
76	Slamet Basuki, AP	Pembina Tk.I (IV/b)	19750311 199311 1 001	Kapala Dinas Kominfo	DINAS KOMINFO
77	Eko Subagyo, SE., M.Si	Pembina (IV/a)	19750523 200501 1 003	Perencana Ahli Muda	DINAS KOMINFO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

78	Drs. Gunawan Widagdo, M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	19660913 198602 1 005	Kepala Dinas PUPR	DINAS PUPR
79	Ir. Agus Bakti Santoso	Pembina Tk.I (IV/b)	19651018 199303 1 009	Sekretaris Dinas PUPR	DINAS PUPR
80	Doni Cahyo Utomo, ST	Penata (III/c)	19760524 101101 1 001	Perencana Ahli Muda	DINAS PUPR
81	Tondo Widodo	Pengatur Tk. I (II/d)	19750826 200701 1 006	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan bermotor	DINAS PUPR
82	Avida Januar Ro'ifa, S.Pd				DINAS PUPR
83	Sasangka Widhi Nugraha, SE				DINAS PUPR
84	Tri Wahyu Kuntjoro, S.Sos., MM	Pembina Tk.I (IV/b)	19720525 199201 1 001	Kepala Dinas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
85	Agung Santosa, ST	Penata Tk.I (III/d)	19760223 201001 1 008	Perencana Ahli Muda	DINAS PERHUBUNGAN
86	Mokh. Sihabuddin Sujihad, SE	Penata (III/c)	19841231 201101 1 004	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	DINAS PERHUBUNGAN
87	Makrus, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	19700411 199203 1 010	Kepala Bidang Angkutan dan Transportasi	DINAS PERHUBUNGAN
88	Hermawan Cahyo Nugroho	Pembina (IV/a)	19810203 200604 1 013	Analis Kebijakan Ahli Muda	DINAS PERHUBUNGAN
89	Agustinus Budi Mulyoto, A.Md	Penata Muda Tk.I (III/b)	19880823 201001 1 010	Pengelola Kepegawaian	DINAS PERHUBUNGAN
90	Cahyo Rachman Pambudi, S.ST	Penata Muda (III/a)	19951115 202203 1 005	Pengawas Lalu Lintas Darat	DINAS PERHUBUNGAN
91	Ain Mukh Surur, S.ST	Penata Muda (III/a)	19931127 202203 1 002	Pengawas Keselamatan Angkutan	DINAS PERHUBUNGAN
92	Agus Frihannedy, S.Pd., M.Si	Pembina Tk.I (IV/b)	19640901 198703 1 013	Kepala Dinas PRKPP	DINAS PRKPP
93	Supardi, SE	Pembina (IV/a)	19670812 199202 1 002	Sekretaris Dinas PRKPP	DINAS PRKPP
94	Heriyanti, SE., M.Si	Pembina (IV/a)	19670519 200604 2 006	Perencana Ahli Muda	DINAS PRKPP
95	Supartini, S.Sos	Penata Muda (III/a)	19730308 200701 2 013	Pengelola Kepegawaian	DINAS PRKPP
96	Devita Tri Purwanti, S.kom	-	-	-	DINAS PRKPP
97	Subani, S.H., MM	Pembina Utama Muda (IV/c)	19691005 198903 1 007	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

98	Siswanto	Penata Tk.I (III/d)	19671120 199503 1 002	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
99	Sudarno, SP	Penata Tk.I (III/d)	19811210 200212 1 002	Perencana Ahli Muda	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
100	Ir. Muslim Harsoyo	Pembina Utama Muda (IV/c)	19640816 199202 1 003	Kepala Dinas Pertanian	DINAS PERTANIAN
101	Jusuf Satrio Wibowo, MT	Pembina Utama Muda (IV/c)	19661011 199403 1 006	Kepala Dinas KPP	DINAS KPP
102	Moch. Rochman, SP	Penata Tk.I (III/d)	19740720 200312 1 007	Perencana Ahli Muda	DINAS KPP
103	Agus Trianto	Pengatur TK.I (II/d)	19740425 200801 1 007	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	DINAS KPP
104	Alwiah Supu Yusuf, S.Sos., M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	19720905 199201 2 001	Sekretaris Dinas Arpus	DINAS ARPUS
105	Waljiyadi, SE	Penata Tk.I (III/d)	19711203 199903 1 005	Perencana Ahli Muda	DINAS ARPUS
106	Suharono, S.Sos.,MM	Pembina Utama Muda (IV/c)	19690509 199003 1 005	Kasat Pol PP	SATPOL PP
107	Dewi Linggarwati				SATPOL PP
108	Istiqomah, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	19680426 199203 2 006	Perencana Ahli Muda	SATPOL PP
109	Hermawan Yudianto, ST	Penata (III/c)	19781011 201101 1 003	Analis Kebijakan Ahli Muda	DINAS DAMKAR
110	Watini, SH	Penata Tk.I (III/d)	19700621 199303 2 009	Perencana Ahli Muda	DINAS DAMKAR
111	Randy				DINAS DAMKAR
112	Drs. Sujito, M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	19700320 199101 1 002	Kepala Dinas Damkar	DINAS DAMKAR
113	Ir. Fadjar Judiono, M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	19640311 199303 1 012	Kapala Bappeda	BAPPEDA
114	Eko Cahyono, S.Sos., M.AP	Pembina (IV/a)	19670730 199302 1 003	Kabid Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	BAPPEDA
115	Budhi Wardhani, SE	Penata Muda (III/a)	19860524 201504 1 001	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	BAPPEDA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

116	Edwi Pradikta, A.Md	Pengatur (II/c)	19870518 202012 1 003	Pengelola Keuangan	BAPPEDA
117	Nono Agung Prastowo, S.STP, M.KP	Pembina (IV/a)	19821101 200212 1 008	Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
118	Nanda Dias Ekaputra, S.STP	Penata Muda Tk. I (IIIb)	19950721 201708 1 003	Penyusun Rencana Program dan Kegiatan	BAPPEDA
119	Kartimah, SE., M.Si	Pembina Tk.I (IV/b)	19640505 198703 2 012	Kepala BPKAD	BPKAD
120	Dra. Agustini Wahyunintyas, M.Si	Pembina Tk.I (IV/b)	19670819 199403 2 011	Sekretaris BPKAD	BPKAD
121	Binti Kolisotin, SE	Penata Tk.I (III/d)	19730318 200901 2 002	Perencana Ahli Muda	BPKAD
122	Naning Awaliyatiningtyas, ST	Penata (III/c)	19770827 201408 2 001	Analis Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	BPKAD
123	Nafhan Tohawi, S.H. , M.H	Pembina Utama Muda (IV/c)	19721208 199803 1 005	Plt Kepala Bapenda	BAPENDA
124	Dra. Dyah Puspita Rini, M.Si.	Pembina Tk.I (IV/b)	19680511 199202 2 001	Sekretaris Bapenda	BAPENDA
125	Nawang Sridari, SH	Penata Tk.I (III/d)	19680524 199302 2 002	Perencana Ahli Muda	BAPENDA
126	Okky Rio Andika Putra, SE	Penata Muda Tk.I (III/b)	19901012 201504 1 001	Pengelola Program Dan Kegiatan	BAPENDA
127	Adam Muharto, AP., M.Si	Pembina Tk.I (IV/b)	19730511 199311 1 002	Kepala Dinas BKPSDM	BKPSDM
128	Suci Ariyanti, SE	Penata (III/c)	19840628 201101 2 009	Perencana Ahli Muda	BKPSDM
129	Agus Heri Widodo, S.Sos	Pembina (IV/a)	19720810 199602 1 002	Kepala Bidang Pengadaan Data dan Mutasi ASN	BKPSDM
130	Atim Swasono, SP., M.Sos	Pembina (IV/a)	19740728 199402 1 001	Kabid Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan	BAKESBANGPOL
131	Didik Ridmawan, SE	Penata Tk.I (III/d)	19810713 200212 1 005	Perencana Ahli Muda	BAKESBANGPOL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

132	Drs. Abdul Wakid, MM	Pembina Utama Muda (IV/c)	19631112 198504 1 002	Kepala Pelaksana BPBD	BPBD
133	Erwin Naharuddin, ST	Penata Tk.I (III/d)	19770420 200604 1 020	Analis Kebijakan Ahli Muda	BPBD
134	Bima Setiawan, S.Kom	Penata (III/c)	19761219 201001 1 012	Perencana Ahli Muda	BPBD
135	Suwarno, SE., MM	Pembina Tk.I (IV/b)	19690115 199803 1 006	Camat Bagor	KECAMATAN BAGOR
136	Emilia Puja Ashari				KECAMATAN BAGOR
137	Rizka Maf'ulatul Fa'idah				KECAMATAN BAGOR
138	Gunawan Wibisono, S.STP	Pembina (IV/a)	19680408 199003 1 012	Plt. Camat Baron	KECAMATAN BARON
139	Irlan Trindoko	Penata (III/c)	19680408 199003 1 012	Kasi Trantib	KECAMATAN BARON
140	Ardiansyah Winardi, SH., M.Si	Pembina (IV/a)	19830514 200112 1 002	Camat Berbek	KECAMATAN BERBEK
141	Imam Baidowi, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	19690716 199202 1 002	Sekretaris Kecamatan Berbek	KECAMATAN BERBEK
142	Sugeng Witoyo	Pengatur TK.I (II/d)	19770902 201001 1 003	Pengadministrasi Keuangan	KECAMATAN BERBEK
143	Drs. Darmantono	Pembina Tk.I (IV/b)	19680421 199403 1 010	Camat Gondang	KECAMATAN GONDANG
144	Muhartono, S.AP	Penata Tk.I (III/d)	19660905 198803 1 013	Kasi Pemerintahan Dan Yanblik	KECAMATAN GONDANG
145	Veven Dwi A.A, SE	Penata Tk.I (III/d)	19841201 201001 1 025	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	KECAMATAN GONDANG
146	Sumilan, S.Pd., M.AP	Penata Tk.I (III/d)	19700320 199602 1 001	Sekretaris Kecamatan Jatikalen	KECAMATAN JATIKALEN
147	Sudarti, A.Md	Penata Muda Tk.I (III/b)	19830825 201001 2 027	Bendahara	KECAMATAN JATIKALEN
148	Deny Susanto				KECAMATAN JATIKALEN
149	Mashudi Nurul Huda, S.STP., MM	Pembina Tk.I (IV/b)	19760608 199511 1 002	Camat Kertosono	KECAMATAN KERTOSONO
150	Khairul Anam, S.Pd., MM	Pembina (IV/a)	19670514 198701 1 001	Sekretaris Kecamatan Kertosono	KECAMATAN KERTOSONO
151	Fajar Nurbudi, SH	Penata Tk.I (III/d)	19690429 199202 1 002	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	KECAMATAN KERTOSONO
152	Syauqi Nazeyli Mutik, S.STP., MM	Pembina (IV/a)	19810129 199912 1 001	Plt. Camat Lengkong	KECAMATAN LENGKONG
153	Nuryana Setyaningrum, SE	Penata Tk.I (III/d)	19760705 201001 2 012	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	KECAMATAN LENGKONG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

154	Nurbinti, S.Sos, MM	Pembina Tk.I (IV/b)	19670920 198809 2 002	Plt. Camat loceret	KECAMATAN LOCERET
155	Bambang Cahyono, S.STP, M.Si	Pembina (IV/a)	19791013 199810 1 002	Bambang Cahyono, S.STP, M.Si	KECAMATAN LOCERET
156	Jaka Setiana	Pengatur TK.I (II/d)	19690515 200906 1 002	Pengadministrasi Kependudukan	KECAMATAN LOCERET
157	Hari Moektiono, S.STP., M.AP.	Pembina Tk.I (IV/b)	19780503 199711 1 001	Camat Nganjuk	KECAMATAN NGANJUK
158	Drs. Agus Puji Santoso, M.Si	Pembina (IV/a)	19690412 199403 1 013	Sekretaris Kecamatan Nganjuk	KECAMATAN NGANJUK
159	Supriadi, SE	Penata Tk.I (III/d)	19730518 199703 1 004	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	KECAMATAN NGANJUK
160	Widi Cahyono, S.STP., M.Si	Pembina Tk.I (IV/b)	19790516 199810 1 001	Camat Ngetos	KECAMATAN NGETOS
161	Suci Putri Arum Mandani				KECAMATAN NGETOS
162	Wardoyo, S.IP., M.Si	Pembina (IV/a)	19750907 199602 1 002	Camat Ngluyu	KECAMATAN NGLUYU
163	Jose Dinis Gago Lopes, S.STP	Penata Tk.I (III/d)	19761101 199802 1 001	Sekretaris Kecamatan Ngluyu	KECAMATAN NGLUYU
164	Untung Suparno, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	19690507 199202 1 001	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	KECAMATAN NGLUYU
165	Mohamad Makrup, S.Sos	Pembina Tk.I (IV/b)	19690115 199003 1 008	Camat Ngronggot	KECAMATAN NGRONGGOT
166	Retno Prabandari, S.Pd., MM	Pembina (IV/a)	19650508 198602 2 005	Sekretaris Kecamatan Ngronggot	KECAMATAN NGRONGGOT
167	Mohammad Toha, S.Kom	Penata Tk.I (III/d)	19650731 198603 1 006	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	KECAMATAN NGRONGGOT
168	Ida Shobihatin, AP., M.Si	Pembina Tk.I (IV/b)	19750116 199412 2 001	Camat Pace	KECAMATAN PACE
169	Imam Tarmuji, S.Sos	Pembina (IV/a)	19690915 199003 1 011	Sekretaris Kecamatan Pace	KECAMATAN PACE
170	Toni Soesanto, S.STP., M.Si	Pembina (IV/a)	19801123 199912 1 003	Plt. Camat Patianrowo	KECAMATAN PATIANROWO
171	Ageng Sutendi	Pengatur Muda (II/a)	19830612 201408 1 001	Pengadministrasi Keuangan	KECAMATAN PATIANROWO
172	Kuwadi, SH	Pembina Tk.I (IV/b)	19670406 198903 1 012	Camat Prambon	KECAMATAN PRAMBON
173	Eko Hariyanto, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	19760414 199703 1002	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	KECAMATAN PRAMBON
174	Johansyah Setiawan, SE.	Pembina Tk.I (IV/b)	19680417 199312 1 004	Camat Rejoso	KECAMATAN REJOSO
175	Suwardi, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	19680421 199003 1 010	Sekretaris Kecamatan Rejoso	KECAMATAN REJOSO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

176	Nuriyah, S.Pd.	Penata Tk.I (III/d)	19660105 198603 2 012	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	KECAMATAN REJOSO
177	Sukirno, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	19690807 199003 1 010	Camat Sawahan	KECAMATAN SAWAHAN
178	Bambang Eddy Joko W	Pengatur TK.I (II/d)	19820331 200901 1 006	Pengadministrasi Pemerintahan	KECAMATAN SAWAHAN
179	Ani Purwandari, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	19690805 199202 2 002	Bendahara	KECAMATAN SAWAHAN
180	Fefri Hendro Wasono, S.Sos., MM	Pembina Tk.I (IV/b)	19750803 199803 1 006	Camat Sukomoro	KECAMATAN SUKOMORO
181	Wisnu Anang Prabowo, S.P	Pembina (IV/a)	19800130 200312 1 002	Sektretaris Kecamatan Sukomoro	KECAMATAN SUKOMORO
182	Bambang Wardho Kusumo, SE	Pembina (IV/a)	19650908 199302 1 003	Sekretaris Kecamatan Tanjunganom	KECAMATAN TANJUNGANOM
183	Darianto, SE	Penata Muda (III/a)	19710519 200906 1 001	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	KECAMATAN TANJUNGANOM
184	Sutomo, S.Sos., MM	Pembina (IV/a)	19740802 199803 1 005	Camat Wilangan	KECAMATAN WILANGAN
185	Narmo, S.Pd	Penata Tk.I (III/d)	19690701 198803 1 001	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	KECAMATAN WILANGAN
186	Bangun Hascaryo	Pengatur Muda (II/a)	19720811 200312 1 007	Pengadministrasi Keuangan	KECAMATAN WILANGAN
187	Anang Wijiarto, S.Sos	Pembina (IV/a)	19650831 199003 1 005	Kabag Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH
188	Siti Uswatun Hasanah, S.STP	Penata (III/c)	19890911 201010 2 001	Analis SDMA Ahli Muda	SEKRETARIAT DAERAH
189	Suwono, S.Sos	Penata (III/c)	19770711 199703 1 007	Analis SDMA Ahli Muda	SEKRETARIAT DAERAH
190	Son Baskoro, SH	Penata Tk.I (III/d)	19821010 201001 1 024	Analis Kebijakan Ahli Muda	SEKRETARIAT DAERAH
191	Maxda Rini, SH., MH	Penata Muda Tk.I (III/b)	19731209 200701 2 020	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	SEKRETARIAT DAERAH
192	Rini Margo Wati, S.IP	Penata Muda Tk.I (III/b)	19930512 201609 2 002	Analis Jabatan	SEKRETARIAT DAERAH
193	Citrawaty W. Gobel, S.IP	Penata Muda Tk.I (III/b)	19970518 201808 2 001	Analis Tata Laksana	SEKRETARIAT DAERAH
194	Harianto	Pengatur TK.I (II/d)	19710403 200801 1 012	Pengadministrasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
195	Gunarso	Pengatur TK.I (II/d)		Pengemudi	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

196	Budiono	Juru Tk.I (I/d)		Pramu Bakti	BAPPEDA

SEKRETARIS DAERAH

Drs. NUR SOLEKAN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198902 1 00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Basuki Rachmad No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp/Faks. (0358) 321746/321111
website : www.nganjukkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/3/411.011/2023

Dasar : Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 005/511/411.000/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 perihal : Bimtek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama	: Sukirno,S.Sos
Pangkat/Gol	: Penata Tingkat I (III/d)
NIP	: 19690807 199003 1 010
Jabatan	: Camat Sawahan

Untuk : Mengikuti Bimtek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sakip pada tanggal 3 s/d 4 Maret di Hotel The Royal Surakarta Heritage Kota Surakarta Jawa Tengah

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 02 Maret 2023
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
KABUPATEN NGANJUK

SAMSUL HUDA,SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660810 199203 1 011

\

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Basuki Rachmad No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp/Faks. (0358) 321746/321111
website : www.nganjukkab.go.id

Lembar Ke : II…….
Kode No. : …….
Nomor : 094/3/411.011/2023

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	Asisten Pemerintahan Dan Kesra
2.	Nama Pegawai yang diperintahkan	Sukirno,S.Sos
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	Penata Tingkat I (III/d) Camat Sawahan
4	Maksud Perjalanan Dinas	Mengikuti Bimtek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sakip
5.	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Roda empat.
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	Kecamatan Sawahan. Hotel The Royal Surakarta Heritage Kota Surakarta Jawa Tengah
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	2 (dua) hari 03 Maret 2023 04 Maret 2023
8.	Pengikut	-
9.	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	 Kantor Kecamatan Sawahan DPA-SKPD Tahun 2023 7.01.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001
10.	Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 02 Maret 2023
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
KABUPATEN NGANJUK

SAMSUL HUDA,SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660810 199203 1 011

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SPPD No. : 094/3/411.011/2023
Berangkat dari : Kantor Kec. Sawahan.
Pada tanggal : 03 Maret 2023
Ke : Hotel The Royal Surakarta Heritage Kota Surakarta Jawa Tengah

II. Tiba di : Hotel The Royal Surakarta Heritage
Pada tanggal : 03 Maret 2023
Kepala

Berangkat dari : Hotel The Royal Surakarta Heritage
Ke : Kantor Kec. Sawahan
Pada tanggal : 04 Maret 2023
Kepala

III. Tiba di :
Pada tanggal :
Kepala

Berangkat dari :
Ke :
Pada tanggal :
Kepala

V. Tiba kembali di : Kantor Kec. Sawahan.
Pada tanggal : 04 Maret 2023
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
KABUPATEN NGANJUK

SAMSUL HUDA,SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660810 199203 1 011

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN